



# LAPORAN

## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAH



**KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



## **VISI DAN MISI 2021– 2026**

**VISI** : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA.

**MISI** :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik),afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.



## **BUPATI MOROWALI UTARA**

---

### ***Kata Pengantar***

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 14 Maret 2025



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

(Kompleks Kantor Bupati)  
Alamat : Jln. Bumi Nangka. Kolonodale Kode Pos – 94971

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, 14 Maret 2025

Inspektorat Daerah  
Kabupaten Morowali utara  
Inspektur,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt  
Pembina Tkt I IV/b  
NIP. 19730724 200012 2 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 memiliki sebanyak 10 (sepuluh) Tujuan, 12 (dua belas) Indikator Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 17 (tujuh belas) target indikator sasaran tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 8 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

<b>Sasaran Strategis 1</b>				
<b>Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Angka Harapan Hidup	71,90	72,19	100,40
Nilai Rata-Rata Sasaran				100,40
<b>Sasaran Strategis 2</b>				
<b>Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar</b>				
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60	12,44	98,73
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,10	9,13	100,32
Nilai Rata-Rata Sasaran				99,52
<b>Sasaran Strategis 3</b>				
<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan</b>				
1.	Indeks Pembangunan Gender	98,30	96,67	98,34

Nilai Rata-Rata Sasaran				98,34
<b>Sasaran Strategis 4</b> <b>Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja</b>				
1.	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,5	2,23*	49,55
Nilai Rata-Rata Sasaran				49,55
<b>Sasaran Strategis 5</b> <b>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>				
1.	Indeks Inovasi daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	39,99 poin (Inovativ)	66,65
Nilai Rata-Rata Sasaran				66,65
<b>Sasaran Strategis 6</b> <b>Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah</b>				
1.	PDRB Perkapita	10.45%	23,04*	220,47
Nilai Rata-Rata Sasaran				220,47
<b>Sasaran Strategis 7</b> <b>Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi</b>				
1.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata	11.950.000.000.000	17.716.666.908.464	148,25
Nilai Rata-Rata Sasaran				148,25
<b>Sasaran Strategis 8</b> <b>Meningkatnya Kemandirian Desa</b>				
1.	Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,7538 Maju	106,58
Nilai Rata-Rata Sasaran				106,58
<b>Sasaran Strategis 9</b> <b>Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan</b>				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,28	79,99	98,41
Nilai Rata-Rata Sasaran				98,41

<b>Sasaran Strategis 10</b>				
<b>Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah</b>				
1.	Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A
Nilai Rata-Rata Sasaran				0
<b>Sasaran Strategis 11</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah</b>				
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	0,522	1,262	241,76
Nilai Rata-Rata Sasaran				241,76
<b>Sasaran Strategis 12</b>				
<b>Meningkatnya Konektivitas Wilayah</b>				
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,90	0,61	67,77
Nilai Rata-Rata Sasaran				67,77
<b>Sasaran Strategis 13</b>				
<b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif</b>				
1.	Predikat SAKIP	>70-80/BB	60,13/B	75,16
2.	Indeks RB	>70-80/BB	69,21/B	86,51
3.	Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
4.	Opini BPK	WTP	WTP*	100
Nilai Rata-Rata Sasaran				87,22

## DAFTAR ISI

1. VISI DAN MISI.....	i
2. KATA PENGANTAR.....	ii
3. PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	iv
4. IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
5. DAFTAR ISI.....	viii
6. DAFTAR TABEL.....	x
7. DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Morowali Utara .....	2
1.2.1. Kondisi Geografi .....	2
1.2.2. Kondisi Demografi .....	8
1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	12
1.2.4. Kawasan Rawan Bencana.....	19
1.2.5. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara.....	20
1.3. Isu Strategis Dan Permasalahan Utama.....	29
1.4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara .....	41
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>45</b>
2.1. Visi Misis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.....	45
2.2. Keselarasan Kinerja.....	59
2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	61
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	66
2.5. Cascading Kinerja .....	72
2.4. Perjanjian Kinerja .....	76
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>79</b>
3.1. Capaian dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.....	79
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja .....	84

3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	143
3.1.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	161
3.1.4. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	164
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	174
3.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	188
3.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah .....	189
3.1.3. Kondisi Pembiayaan Daerah.....	191
<b>BAB IV PENUTUP</b>	192
4.1 Kesimpulan .....	192
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja.....	193

**LAMPIRAN :**

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

## DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 1	Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan, Tahun 2023	3
Tabel. 2	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2023	6
Tabel 3	Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara	7
Tabel. 4	Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, 2020-2023	9
Tabel. 5	Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Utara, 2023	9
Tabel. 6	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024	10
Tabel. 7	Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023	11
Tabel 8	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, 2023	11
Tabel. 9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Morowali Utara, 2023	12
Tabel. 10	Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	13
Tabel. 11	Luas Kawasan Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	14
Tabel. 12	Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	17
Tabel. 13	Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020	21
Tabel. 14	Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	24
Tabel. 15	Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	26
Tabel. 16	Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2023-2024	28
Tabel. 17	Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara	48
Tabel 18	Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	48
Tabel. 19	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	53
Tabel. 20	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	55
Tabel. 21	Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	56

Tabel. 22	Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	57
Tabel. 23	Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	62
Tabel. 24	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Morowali Utara Tahun 2022-2026	68
Tabel. 25	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024	77
Tabel. 26	Skala Nilai Peringkat Kinerja	79
Tabel. 27	Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024	80
Tabel. 28	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat " Tahun 2024	84
Tabel. 29	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2024	85
Tabel. 30	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2024	85
Tabel. 31	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	86
Tabel. 32	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024	86
Tabel. 33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar" Tahun 2024	87
Tabel. 34	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024	88
Tabel. 35	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s.d 2024	88
Tabel. 36	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	89
Tabel. 37	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024	90
Tabel. 38	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024	91
Tabel. 39	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 s.d 2024	92
Tabel. 40	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	93
Tabel. 41	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024	93
Tabel. 42	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan" Tahun 2024	94
Tabel. 43	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024	95
Tabel. 44	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja	95

	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 s.d 2024	
Tabel. 45	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 Dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	96
Tabel. 46	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024	97
Tabel. 47	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" Tahun 2024	97
Tabel. 48	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024	98
Tabel. 49	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 s.d 2024	99
Tabel. 50	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	100
Tabel. 51	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi	100
Tabel. 52	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" Tahun 2024	101
Tabel. 53	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024	102
Tabel. 54	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 s.d 2024	102
Tabel. 55	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	103
Tabel. 56	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024	104
Tabel. 57	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" Tahun 2023	104
Tabel. 58	Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2024	106
Tabel. 59	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2021 s.d 2024	106
Tabel. 60	Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	107
Tabel. 61	Perbandingan PDRB Perkapita dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024	107
Tabel. 62	Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." Tahun 2024	108
Tabel. 63	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) Tahun 2024	109
Tabel. 64	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) Tahun 2021-2024	110
Tabel. 65	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pertumbuhan	110

	<i>Investasi (PMA + PMDN) Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026</i>	
Tabel 66	Perbandingan <i>Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi</i>	111
Tabel. 67	Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa” Tahun 2024	111
Tabel. 68	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja <i>Indikator Indeks Desa Membangun Tahun 2024</i>	113
Tabel. 69	Status Indek Desa Membangun Tahun 2024	114
Tabel. 70	Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2023	114
Tabel. 71	Realisasi Indikator Kinerja Satatus Indeks Desa Membangun Tahun 2021 s.d 2024	115
Tabel. 72	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	116
Tabel. 73	Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi	117
Tabel. 74	Capaian Indikator Sasaran “Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan” Tahun 2024	117
Tabel. 75	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024	118
Tabel. 76	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja IKLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s.d 2024	119
Tabel. 77	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	119
Tabel. 78	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi	120
Tabel. 79	Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah” Tahun 2024	121
Tabel. 80	Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2024	121
Tabel. 81	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum serta Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2024	122
Tabel. 82	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2021-2024	123
Tabel. 83	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	123
Tabel. 84	Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah” Tahun 2024	124
Tabel. 85	Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Tahun 2024	125
Tabel. 86	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024	126

Tabel. 87	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s/d 2024	126
Tabel. 88	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Dengan Target RPJMD 2021-2026	127
Tabel. 89	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Dengan Target Nasional/Provinsi	127
Tabel. 90	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Konektifitas Wilayah" Tahun 2024	128
Tabel. 91	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2024	128
Tabel. 92	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2024	129
Tabel. 93	Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	130
Tabel. 94	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi	130
Tabel. 95	Capaian Indikator Sasaran "Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" Tahun 2024	131
Tabel. 96	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024	132
Tabel. 97	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024	133
Tabel. 98	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	133
Tabel. 99	Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi	134
Tabel. 100	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2024	135
Tabel. 101	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2021-2024	135
Tabel. 102	Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	136
Tabel. 103	Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi	136
Tabel. 104	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024	137
Tabel. 105	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2021-2024	138
Tabel. 106	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	138
Tabel. 107	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun	139

Tabel. 108	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2024	140
Tabel. 109	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2021-2024	140
Tabel. 110	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	141
Tabel. 111	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022-2024	141
Tabel. 112	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	161
Tabel. 113	Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024	164
Tabel. 114	Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	175
Tabel. 115	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2024 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024	189
Tabel. 116	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024	190
Tabel. 117	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024	191

## DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
Gambar. 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara	4
Gambar. 2	<i>Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara</i>	20
Gambar. 3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional 2016–2020	22
Gambar. 4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	23
Gambar. 5	Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	27
Gambar. 6	Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019	37
Gambar. 7	Keterkaitan Isu-Isu startegis International, nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara	41
Gambar. 8	Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025	46
Gambar. 9	Tema Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025	47
Gambar. 10	Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026	50
Gambar. 11	Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026	52
Gambar. 12	Perkembangan PDRB Morowali Utara	105

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG.**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan RPJMD Periode 2021-2026 dengan Visi Bupati terpilih adalah **"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"**.

Untuk penyusunan LAKIP pemerintah daerah tahun 2024 mengacu pada RPJMD Periode 2021-2026 yang telah dilakukan revisi atau perbaikan RPJMD pada bab V halaman 18 s/d 49 tabel 5.4 berisi visi misi

tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 yaitu sebelum perbaikan sebanyak antara lain:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 15
- sasaran strategis bupati sebanyak: 48
- indikator bupati sebanyak : 81

Setelah dilakukan perbaikan oleh tim sikip kabupaten dan 10 dinas klaster utama melalui bimtek sikip yang narasumber dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 pada bulan agustus, maka tujuan, sasaran dan indikator tersebut berkurang karena banyak indikator level eselon II yang dijadikan IKU Bupati. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Perbup No. 29 tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. dengan jumlah perubahan sebagai berikut:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 10
- indikator tujuan bupati sebanyak: 12
- sasaran strategis bupati sebanyak: 13
- indikator kinerja sasaran strategis Bupati sebanyak: 17

Berdasarkan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berdampak pada perubahan IKU eselon II atau kepala Perangkat Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra dengan mengemban visi dan misi pemerintah daerah yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"**. Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah akhir RPJMD Periode 2021-2026.

## **1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **1.2.1. Kondisi Geografi**

#### **a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut:

##### **1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara dalam angka 2024, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km<sup>2</sup> dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km<sup>2</sup>. Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.362,39 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3

Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km<sup>2</sup> atau 24,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 480,30 Km<sup>2</sup> atau sebesar 4,80 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara. Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel.1 sebagai berikut.

**Tabel. 1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara**  
**Menurut Kecamatan, Tahun 2023**

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km <sup>2</sup> /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Mori Atas	Tomata	1.508,81
Lembo	Beteleme	675,23
Lembo Raya	Petumbea	657,61
Petasia Timur	Bungintimbe	509,77
<b>Petasia</b>	<b>Kolonodale</b>	<b>646,34</b>
Petasia Barat	Tiu	480,30
Mori Utara	Mayumba	1.048,93
Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51
Bungku Utara	Baturube	2.406,79
Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99
<b>Morowali Utara</b>	<b>Kolonodale</b>	<b>10.004,28</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, Tahun 2024

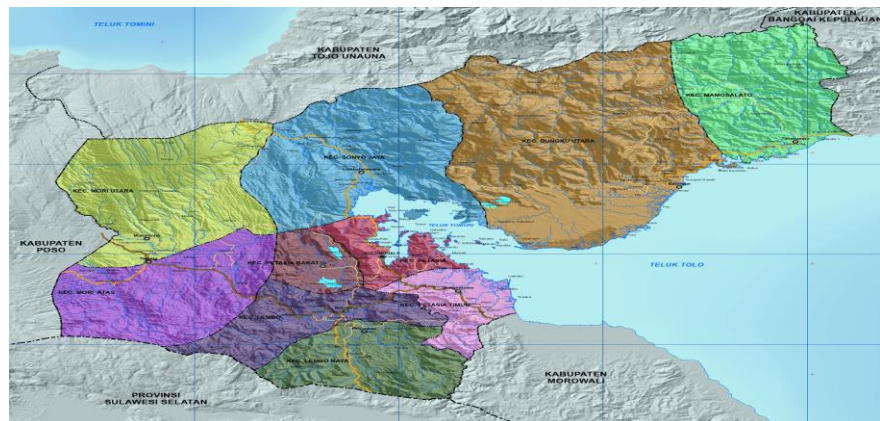
Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar di Sulawesi Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 10.004,28 Km<sup>2</sup> atau sekitar 16,18 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

<b>Sebelah Utara</b>	• Kabupaten Tojo Unauna
<b>Sebelah Selatan</b>	• Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
<b>Sebelah Barat</b>	• Kabupaten Poso
<b>Sebelah Timur</b>	• Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

## 2) Letak dan Kondisi Geografis

Kedudukan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu daerah potensial di kawasan Timur dan Tenggara Teluk Tolo Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti penting dan bersifat strategis dipandang dari stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka secara geografis Kabupaten Morowali Utara terletak pada koordinat antara 01031'12" Lintang Selatan 03046'48" Lintang Selatan serta 121002'24" Bujur Timur 123015'36" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak di sekitar Teluk Tolo, Teluk Tomori sampai pada daerah pedalaman yang berbentuk lembah, perbukitan, dan pegunungan.

**Gambar 1**  
**Peta Wilayah Administrasi**  
**Kabupaten Morowali Utara**



Sumber: Profil Kab. Morowali Utara, data diolah kembali, tahun 2024

Saat dibentuk pertama kalinya, Kabupaten Morowali ber ibukota di Kolonodale (ibukota Morowali Utara sekarang). Ibu kota definitif Kabupaten Morowali sekarang, yakni di Bungku (Bungku Tengah), sesuai dengan undang-undang dan telah difungsikan sejak 2 Mei 2006. Sedangkan Kolonodale telah menjadi ibukota Kabupaten Morowali Utara. Kondisi geografis Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota Kabupaten yang berkedudukan di Kolonodale berbatasan dengan

laut (Perairan Teluk Tolo) sehingga dapat dicapai melalui laut, darat atau kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah lainnya.

**b. Kondisi Topografi**

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berdasarkan elevasi, 60 persen wilayah Kabupaten Morowali Utara berada pada ketinggian antara 0-100 meter dpl, sebesar 40 persen berada pada ketinggian antara 101-500 meter dpl (Tabel 1). Menurut tingkat kelerengan wilayah ini sebesar 52,30 persen memiliki kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam sangat curam), sebesar 11,70 persen memiliki kemiringan dibawah 2 persen (datar agak landai), sebesar 12,56 persen memiliki kemiringan antara 3 persen -15 persen dan 23,30 persen luas wilayah memiliki kemiringan antara 16 persen-40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen. Akibat curah hujanya ngtinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa.

**c. Kondisi Klimatologi**

Iklm wilayah Kabupaten Morowali Utara dipengaruhi sirkulasi sistem global, munson, dan lokal. Secara Tahunan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bulan terbasah terjadi pada Juni (760,28 mm) dan bulan terkering (40,40 mm) terjadi pada Agustus. Berdasarkan klasifikasi **Schmidt-Fergusson**, Wilayah Kabupaten Morowali Utara, tergolong iklim A atau sangat basah dengan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara (26,5°C) sampai (27,4°C).

**Tabel. 2**  
**Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan**  
**Menurut Bulandi Kabupaten Morowali Utara,**  
**Tahun 2023**

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	21,80	27,10	33,40	57,00	84,70	98,00
Februari/February	23,00	27,00	32,80	58,00	86,40	98,00
Maret/March	22,20	27,40	33,60	54,00	84,20	98,00
April/April	22,80	27,70	34,00	59,00	84,50	98,00
Mei/May	22,60	27,80	34,40	57,00	84,60	100,00
Juni/June	22,00	27,70	35,20	54,00	83,40	100,00
Juli/July	21,60	28,00	34,00	46,00	79,10	99,00
Agustus/August	21,20	28,50	35,20	43,00	73,40	98,00
September/September	21,40	28,50	35,00	35,00	70,70	98,00
Oktober/October	19,20	28,10	35,20	37,00	78,40	98,00
November/November	22,80	28,30	34,20	54,00	81,60	98,00
Desember/December	22,00	28,00	33,60	54,00	83,60	100,00

Bulan Month	Kecepatan Angin (m/det) Wind Velocity (m/sec)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mbar)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/January	-	1,7	10,0	1.002,6	1.007,4	1.012,0
Februari/February	-	1,5	10,0	1.004,0	1.007,8	1.012,2
Maret/March	-	2,1	13,0	1.004,5	1.008,9	1.013,4
April/April	-	1,7	11,0	1.003,6	1.007,9	1.012,6
Mei/May	-	1,9	10,0	1.001,3	1.009,2	1.013,7
Juni/June	-	2,0	11,0	1.005,2	1.009,0	1.012,7
Juli/July	-	2,5	11,0	1.005,7	1.009,3	1.013,5
Agustus/August	-	3,4	13,0	1.006,0	1.010,1	1.014,4
September/September	-	3,5	13,0	1.005,8	1.009,4	1.012,2
Oktober/October	-	2,7	12,0	1.005,5	1.010,0	1.013,6
November/November	-	2,1	11,0	1.003,9	1.008,5	1.012,6
Desember/December	-	1,6	12,0	1.004,6	1.008,6	1.013,4

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	56,90	15	7,7
Februari/February	198,80	19	6,8
Maret/March	117,20	23	4,2
April/April	189,10	19	3,5
Mei/May	200,20	24	5,5
Juni/June	276,90	19	5,2
Juli/July	93,60	18	5,2
Agustus/August	209,60	11	5,2
September/September	108,80	11	5,3
Oktober/October	226,70	10	8,0
November/November	123,70	21	7,2
Desember/December	355,70	18	8,9

Catatan/Note: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol/Calm is wind velocity close to zero  
 Sumber/Source: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2023

#### d. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Morowali Utara tersusun atas beberapa jenis batuan antara lain, batuan Mollase,

batuan Kapur, batuan Skiss, batuan Basik, Ultra basik dan Sedimen. Dari sisi geomorfologi, wilayah ini tersusun atas beberapa bentuk lahan (landform), yaitu bentuk lahan Aluvial (A), Marine (M), Vulkanik (V), Tektonik dan Struktural (T). Bentuk lahan aluvial terbentuk dari proses fluvial yang umumnya tersebar di dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 persen, dan banyak di jumpai di sekitar sungai-sungai besar. Bentuk lahan marine tersebar pada wilayah datar agak cekung disepanjang pantai. Bentuk lahan tektonik dan vulkanik tersebar pada relief yang bergelombang sampai bergunung.

**e. Kondisi Hidrologi**

Kabupaten Morowali Utara memiliki banyak sungai dan Kecamatan yang memiliki sungai adalah Kecamatan Mori Atas (7 sungai) Kecamatan Bungku Utara (15 sungai) dan Kecamatan Mamosalato (12 sungai). Sungai terpanjang adalah sungai Laa yang melintasi 5 (lima) Kecamatan, yaitu 1) Kecamatan Mori Atas, 2) Kecamatan Petasia Timur, 3) Kecamatan Petasia Barat, 4) Kecamatan Mori Utara. Sungai Bongka sebagai sungai terpanjang kedua melintasi Kecamatan Mamosalato. Sungai terpanjang ketiga melintasi Kecamatan Bungku Utara yaitu Sungai Tiworo. Sungai terpanjang keempat adalah Sungai Sumara yang melintasi Kecamatan Soyo Jaya. Data dan informasi mengenai nama-nama dan ukuran sungai di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada tabel. 3 sebagai berikut.

**Tabel. 3**  
**Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara**

No.	Kecamatan/Desa	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Mamosalato	S. Pangkape	3,00
		S. Kaia	2,00
		S. Kapali	2,00
		S. Manandar	15,00
		S. Uekauru	15,00
		S. Uefayau	4,00
		S. Tamarando	6,00
		S. Tomba	5,00
		S. Uekawoa	5,00
		S. Uewine	15,00
		S. Mumungi	5,00
		S. Bongka	60,00
		2.	Bungku Utara
S. Lamuru	8,00		

		S. Paididi	5,10
		S. Bongka	38,00
		S. Solato	29,00
		S. Siombo	18,00
		S. Tirongan	43,00
		S. Morowangu	9,00
		S. Morowali	37,00
		S. Ula	47,00
		S. Tiworo	53,00
		S. Nua-Nua	21,00
		S. Tofu	19,00
		S. Uemanu	22,00
		S. Samara	23,00
3.	Petasia	S. Laa	117,00
4.	Petasia Barat	S. Laa	117,00
5.	Petasia Timur	S. Laa	117,00
6.	Lembo	S. Tambalako	...
7.	Lembo Raya	S. Tambalako	...
		S. Sokita	...
		S. Tambalako	105,00
8.	Mori Atas	S. Ensa	17,00
		S. Kadata	15,00
		S. Kolaka	25,00
		S. Kuse	27,00
		S. Laa	37,00
		S. Talolae	20,00
		S. Yaintu	23,00
		S. Koromboyo	....
		S. Towerio	....
9.	Mori Utara	Koro Njaya	22,00
		Koro Mayumba	24,00
		Koro Sampa	7,00
		S. Kuse	27,00
		Korontiwa	8,00
		S. Laa	37,00
		S. Korompalia	10,00
		S. Karuru	15,00
		Koro Era	20,00
		S. Yaintu	23,00
		Koro Dolo	15,00
10.	Soyo Jaya	S. Busanga	20,00
		S. Sumara	45,00

Sumber: Statistik Kabupaten Morowali Utara , Tahun 2024

## 1.2.2. Kondisi Demografi

### a. Laju Pertumbuhan Dan Perebaran Penduduk

Berdasarkan data dari BPS Morowali Utara Dalam Angka Tahun 2024 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2020-2023 mencapai sebanyak 126.05 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2023 sebesar 1,56 persen. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali Utara tahun 2020-2023 tersaji pada tabel 4 berikut.

**Tabel. 4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi**  
**Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio**  
**Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Morowali Utara, 2020-2023**

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 Annual Population Growth Rate (%) 2020–2023
(1)	(2)	(3)
Mori Atas	13,17	1,87
Lembo	14,84	1,14
Lembo Raya	8,49	1,14
Petasia Timur	17,51	2,27
<b>Petasia</b>	<b>19,18</b>	<b>2,26</b>
Petasia Barat	8,22	2,27
Mori Utara	8,40	1,67
Soyo Jaya	9,10	1,17
Bungku Utara	16,18	0,81
Mamosalato	10,96	0,58
<b>Morowali Utara</b>	<b>126,05</b>	<b>1,56</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Petasia pada Tahun 2020-2023 berjumlah 126,05 jiwa, Kecamatan Petasia Timur sebesar 17,51 jiwa, Kecamatan Bungku Utara sebanyak 16,18 jiwa dan Kecamatan Lembo sebanyak 14,84 jiwa, serta Kecamatan Mori Atas sebanyak 13,17 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Petasia Barat mencapai 2,27% dan terdapat laju pertumbuhan yang minus paling rendah yaitu Kecamatan Mamosalato mencapai 0,58%.

**Tabel. 5**  
**Persentase Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Morowali Utara, 2023**

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Population Density per sq.km
(1)	(2)	(3)
Mori Atas	10,45	8,73
Lembo	11,77	21,98
Lembo Raya	6,74	12,91
Petasia Timur	13,89	34,35
<b>Petasia</b>	<b>15,22</b>	<b>29,67</b>
Petasia Barat	6,52	17,11
Mori Utara	6,66	8,01
Soyo Jaya	7,22	15,03
Bungku Utara	12,84	6,72
Mamosalato	8,69	7,48
<b>Morowali Utara</b>	<b>100,00</b>	<b>12,60</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2024 (diolah kembali)

Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu di Petasia Barat sebanyak 6,52 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Petasia Timur, yaitu 34,35 orang per Km<sup>2</sup>, penduduk Kabupaten Morowali Utara sebesar 12,60. Data mengenai persentase jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara menurut Kecamatan terlihat pada Gambar 2 Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 454,70 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Banggai Laut sebanyak 73,10 ribu jiwa. Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Tabel 6 sebagai berikut;

**Tabel. 6**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	120,14	121,68	123,58	123,42	124,58
Banggai	362,28	366,22	370,97	373,69	377,60
Morowali	161,73	167,91	176,24	170,45	173,31
Poso	244,88	248,35	252,65	251,65	254,06
Donggala	300,44	302,97	305,89	308,30	311,00
Toli-Toli	225,15	226,80	228,64	231,71	233,90
Buol	145,25	146,63	148,25	150,52	152,36
Parigi Moutong	440,02	443,17	446,71	454,70	459,78
Tojo Una-Una	163,83	166,34	169,48	169,00	170,82
Sigi	257,59	261,68	266,81	266,66	269,96
Banggai Laut	70,44	70,87	71,35	73,10	74,02
Morowali Utara	120,79	122,24	124,01	126,05	127,87
Kota Palu	373,22	377,03	381,57	387,49	392,51
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.985,73</b>	<b>3.021,88</b>	<b>3.066,14</b>	<b>3.086,75</b>	<b>3.121,75</b>

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024 (diolah kembali)

**b. Kepadatan Penduduk**

Pada tahun 2023, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Petasia Timur, yaitu 34 orang per km dengan luas wilayahnya sebesar 509,77 km (5,10 persen dari total Kabupaten Morowali Utara). Kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Bungku Utara, yaitu 6-7 orang per km dengan luas wilayah sebesar 2.406,79

km<sup>2</sup>. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

**Tabel. 7**  
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2023**

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Population Density per sq.km
(1)	(7)	(8)
Mori Atas	10,45	8,73
Lembo	11,77	21,98
Lembo Raya	6,74	12,91
Petasia Timur	13,89	34,35
<b>Petasia</b>	<b>15,22</b>	<b>29,67</b>
Petasia Barat	6,52	17,11
Mori Utara	6,66	8,01
Soyo Jaya	7,22	15,03
Bungku Utara	12,84	6,72
Mamosalato	8,69	7,48
<b>Morowali Utara</b>	<b>100,00</b>	<b>12,60</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2024 (diolah kembali)

**c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Perbandingan Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Morowali Utara sebagian besar sudah di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Morowali Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Secara lengkap disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut.

**Tabel. 8**  
**Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Morowali Utara, 2023**

Kecamatan Subdistrict	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
(1)	(11)
Mori Atas	107,40
Lembo	108,43
Lembo Raya	107,07
Petasia Timur	114,85
<b>Petasia</b>	<b>106,90</b>
Petasia Barat	114,62
Mori Utara	107,41
Soyo Jaya	111,14
Bungku Utara	106,11
Mamosalato	105,63
<b>Morowali Utara</b>	<b>108,83</b>

#### d. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk dilihat dari aspek umur, diketahui bahwa 0-14 Tahun sebanyak 34.145 jiwa, usia >64 Tahun sebanyak 6.339 jiwa. Total penduduk usia tidak produktif sebanyak 40.484 Jiwa atau sebesar 33,52 persen. Selanjutnya penduduk usia 15-64 Tahun sebanyak 80.305 jiwa atau sebesar 66,48 persen. Untuk *dependency ratio* penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 sebesar 50,41. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 50 orang penduduk yang belum/tidak produktif yang disajikan pada Tabel 9 berikut ini.

**Tabel 9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Morowali Utara, 2023**

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah(ribu) Total (thousand)
	Laki-Laki (ribu) Male (thousand)	Perempuan (ribu) Female (thousand)	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	5,66	5,31	10,97
5-9	5,94	5,78	11,72
10-14	5,84	5,55	11,39
15-19	5,6	5,11	10,71
20-24	5,29	4,77	10,06
25-29	5,34	4,79	10,13
30-34	5,35	4,96	10,31
35-39	5,18	4,7	9,88
40-44	4,69	4,14	8,83
45-49	4,21	3,8	8,01
50-54	3,59	3,15	6,74
55-59	3	2,64	5,64
60-64	2,33	2,1	4,43
65-69	1,66	1,51	3,17
70-74	1,04	1,01	2,05
75+	0,97	1,04	2,01
<b>Morowali Utara</b>	<b>65,69</b>	<b>60,36</b>	<b>126,05</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2024 (diolah kembali)

### 1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

#### a. Pertanian

Potensi pengembangan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara seluas 32,458.88 ha, dan masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 19,035 ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

- **Untuk Lahan Basah;** pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah

maupun secara teknis dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengkan kawasan dibawah 3% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 50 cm.

- **Untuk Lahan Kering;** lebih diarahkan pada pengembangan padi gogo, palawija dan hortikultura dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengkan kawasan di bawah 8% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 60 cm.

Adapun luas kawasan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

**Tabel. 10**  
**Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (%)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	
1.	Bungku Utara	150.881	1.454,69	0,96
2.	Lembo	67.523	318,66	0,47
3.	Lembo Raya	65.761	2.421,69	3,68
4.	Mamosalato	52.361	6.682,96	12,76
5.	Mori Atas	64.634	701,58	1,09
6.	Mori Utara	48.030	550,40	1,15
7.	Petasia	104.893	887,27	0,85
8.	Petasia Barat	60.551	6.507,78	10,75
9.	Petasia Timur	240.679	12.568,04	5,22
10.	Soyo Jaya	146.499	365,81	0,25
<b>Morowali Utara</b>		<b>1.001.812</b>	<b>32.458,88</b>	<b>3,24</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, diolah Tahun 2021

#### **b. Perkebunan**

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara dengan luas sebesar 86,645.09 Ha. Komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:

- Kakao, terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia;
- Cengkeh, terdapat di Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kelapa, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Jambu mete, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Vanili, terdapat di Kecamatan Soyo Jaya;
- Sagu, terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
- Karet, terdapat di Kecamatan Lembo;
- Sawit, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

Uraian luas kawasan perkebunan beserta sebarannya di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

**Tabel. 11**  
**Luas Kawasan Perkebunan**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (%)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Perkebunan	
1.	Mamosalato	148.000,00	923,8	0,62
2.	Bungku Utara	240.679,00	2.686,10	1,12
3.	Soyo Jaya	60.551,00	5.706,70	9,42
4.	Petasia	64.634,00	1.041	1,61
5.	Petasia Barat	46.529,00	1.682,50	3,62
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.884	5,51
7.	Lembo	67.523,00	2.526	3,74
8.	Lembo Raya	65.761,00	3.837,50	5,84
9.	Mori Atas	104.893,00	4.932,40	4,70
10.	Mori Utara	150.881,00	2.496,50	1,65
<b>Morowali Utara</b>		<b>1.001.812</b>	<b>28.717,50</b>	<b>2,87</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara dalam angka 2021

### c. **Peternakan**

Kegiatan peternakan tidak mengalokasikan pada suatu kawasan tertentu, namun dapat saja dilakukan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan dan atau pada sekitar kawasan hortikultura.

Adapun komoditas peternakan yang cukup dominan di Kabupaten Morowali Utara adalah seperti:

#### **Ternak besar berupa:**

- Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Soyo Jaya;

#### **Ternak sedang berupa:**

- Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas;
- Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;

#### **Unggas berupa:**

- **Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas,** Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

### d. **Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

#### **1) Perikanan Tangkap**

Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara tersebar pada perairan laut Kabupaten Morowali Utara.

#### **2) Perikanan Budidaya**

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

- Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- Kawasan budidaya Tambak, Kolam, Empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur;
- Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya;

Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara; dan Kecamatan Bungku Utara.

**3) Kawasan Minapolitan**

Rencana Kawasan Minapolitan di Kabupaten Morowali Utara adalah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur dan Kawasan Minapolitan Bahoue Kecamatan Petasia.

**4) Kawasan Pengolahan Ikan dan Rumput Laut**

Pengolahan hasil produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara direncanakan pada Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

**5) Pertambangan**

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumberdaya bahan galian yang sangat variatif dan potensial untuk dikembangkan, potensi sumberdaya yang ada dapat dikelompokkan kedalam jenis bahan galian strategis (golongan A) yaitu; Minyak bumi dan gas, batubara dan nikel, bahan galian vital (bahan galian golongan B) yaitu; Chromit serta bahan galian non strategis dan vital yaitu; lempung, marmer, onyx dan kaolin, dengan sebaran wilayah pertambangan sebagai berikut:

1) Kawasan Pertambangan Strategis:

- a. Minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara dengan luas area kurang lebih 47.500 Ha, Kecamatan Mamosalato, dan Perairan Teluk Tolo;
- b. Batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dengan luas area kurang lebih 300 Ha dan Kecamatan Bungku Utara;
- c. Nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia dengan luas area sebesar 15.355 Ha dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas area 4.494 Ha;

2) Kawasan Pertambangan Vital (Golongan B):

- a. Chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Soyo Jaya;
  - b. Emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
  - c. Batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara.
- 3) Kawasan Pertambangan non Strategis dan Vital (Golongan C):
- a. Lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas;
  - b. Marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia dan Kecamatan Mori Atas;
  - c. Onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Lembo;
  - d. Kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas.

**Tabel. 12**  
**Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara**

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	Marmer 1	Nikel 1	Nikel 3 C	Nikel 3b
Bungku Utara	-	-	-	-	15,442.30
Lembo	-	-	10,986.74	-	-
Lembo Raya	-	-	5,523.97	-	-
Mamosalato	-	-	-	-	13,866.78
Mori Atas	4,369.04	30.40	-	-	-
Mori Utara	5.04	2.06	-	-	-
Petasia	-	8,359.12	1,128.16	5,156.15	-
Petasia Barat	-	2,172.71	72.54	749.08	-
Petasia Timur	-	208.42	11,506.49	-	-
Soyo Jaya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4,374.08</b>	<b>10,772.71</b>	<b>29,217.89</b>	<b>5,905.23</b>	<b>29,309.09</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

## 6) Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Morowali Utara lebih diarahkan berlokasi mendekati sumber bahan baku (*raw material oriented*) yang terdiri atas:

- 1). Kawasan Peruntukan Industri Besar.
  - a. Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertanian terdapat di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
  - b. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur.
  - c. Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.
- 2). Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga yang Tersebar di Seluruh Kecamatan.

## **7) Pariwisata**

Kawasan yang peruntukan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

- 1). Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya yaitu:
  - a. Situs Rumah Raja Mori, Kecamatan Petasia Barat;
  - b. Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.
  - c. Makam Raja Mori Kecamatan Petasia.
  - d. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- 2). Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam yaitu:
  - a. Taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
  - b. Wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
  - c. Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
  - d. Batu Payung di Kecamatan Petasia;
  - e. Pasir putih Pantai Siliti, Air Terjun Warampadoa Kecamatan Bungku Utara;
- 3). Kawasan Peruntukan Pariwisata Cagar Alam yaitu:
  - a. Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan

- b. Taman Buru Landasa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- 4) Kawasan yang Peruntukan Pariwisata Buatan (pertanian/agriwisata) yaitu:
  - a. Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.
  - b. Makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; dan
  - c. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

#### **1.2.4. Kawasan Rawan Bencana**

Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana antara lain:

- 1) Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
- 2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kriteria Kawasan rawan gelombang pasang/Tsunami adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer perjam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.
- 3) Kawasan Rawan Banjir Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
- 4) Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai

dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami.

**Gambar. 2**  
**Peta Wilayah Rawan Bencana**  
**Kabupaten Morowali Utara**



*Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.*

### **1.2.5. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara**

#### **a. Pertumbuhan PDRB**

Perekonomian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan kebijakan ekspor pertambangan melalui proses industri pengolahan smelter, dimana menunjukkan peningkatan ekspor tambang nikel Kabupaten Morowali Utara. Selain itu dengan semakin merebahnya Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja ekonomi daerah. Laju pertumbuhan PDRB Morowali Utara Tahun 2020 menurun cukup tajam mencapai 2,04 persen, sedangkan Tahun 2019 sebesar 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori industri pengolahan sebesar 45,19 persen, jasa komunikasi dan informasi sebesar 8,96 persen, pertambangan dan penggalian 7,35 persen. Penurunan pertambangan dan penggalian terutama dari penggalian nikel yang cukup besar diakibatkan berkurangnya permintaan ekspor luar negeri terhadap komoditas tambang nikel. Data laju pertumbuhan riil PDRB

Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 13 sebagai berikut.

**Tabel. 13**  
**Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020**

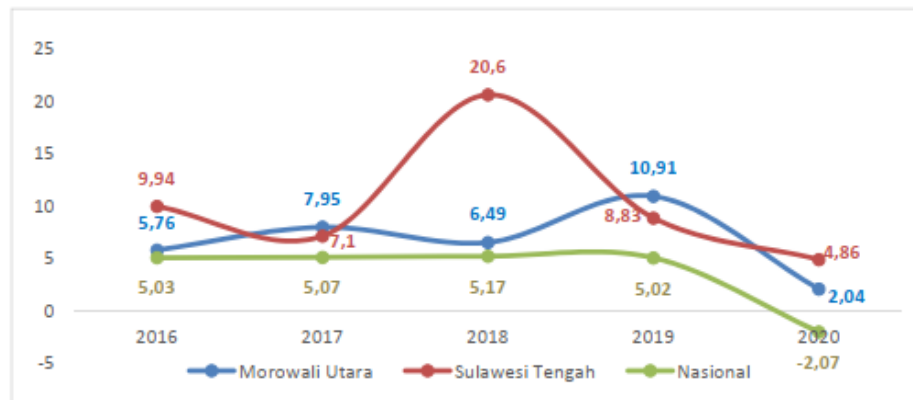
<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.53	4.34	4.05	7.01	(1.84)
B. Pertambangan dan Penggalian	20.12	43.73	24.69	18.61	7.35
C.Industri Pengolahan	16.12	27.49	5.92	3.55	45.19
D.Pengadaan Listrik dan Gas	5.56	6.67	7.96	9.04	6.87
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.98	11.29	12.55	2.32	(6.93)
F.Konstruksi	0.02	(20.87)	(92.01)	979.60	(3.64)
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.08	5.27	4.98	2.11	(6.40)
H.Transportasi dan Pergudangan	10.71	6.49	7.75	6.73	(33.70)
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.63	6.88	7.86	5.66	(16.15)
J.Informasi dan Komunikasi	7.50	10.59	9.92	6.81	8.96
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	22.60	10.33	8.11	6.67	6.52
L.Real Estat	5.06	2.15	3.03	4.12	(2.54)
M,N.Jasa Perusahaan	9.47	9.55	10.82	6.51	(1.99)
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.57	6.70	7.90	8.12	(0.41)
P.Jasa Pendidikan	6.78	6.91	4.74	4.88	(5.19)
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.34	6.38	5.30	7.11	5.74
R,S,T,U.Jasa lainnya	9.44	9.56	10.79	3.12	(5.90)
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5.76</b>	<b>7.95</b>	<b>6.49</b>	<b>10.91</b>	<b>2.04</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Peningkatan nilai tambah (*valueadded*) secara sektoral tersebut dari agregasi pertumbuhan subsektor-subsektor dalam sektor tersebut. Perkembangan masing-masing subsektor juga berasal dari komoditas unggulan subsektor tersebut. Misalnya, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi

perikanan, padi dan hortikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya (*multiplier effect*). Produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 3 sebagai berikut.

**Gambar. 3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Morowali Utara,**  
**Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional**  
**2016–2020**

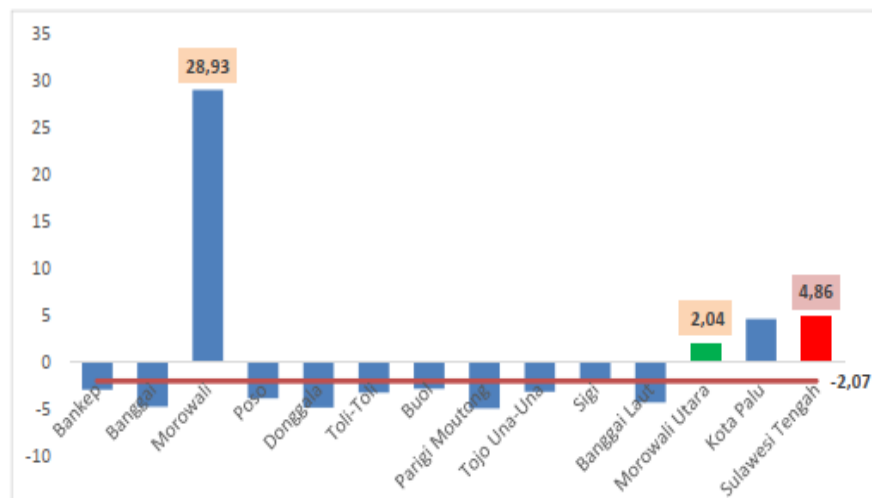


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 dibawah laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2020 sebesar 2,04 persen menurun dari tahun 2019 yang tumbuh 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Morowali Utara lebih rendah dari pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,86 persen, namun jauh berada diatas pertumbuhan nasional sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2020 mengalami penurunan, namun masih tumbuh positif dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah, kecuali dengan Kabupaten Morowali yang tumbuh 28,93%. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara sebesar 10,91 persen berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Morowali sebesar 14,51 persen, dan pertumbuhan ini berada diatas rata-rata provinsi sebesar 7,15 persen. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019, dipercepat adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi tersebut

adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pabrik smelter nikel. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor kenegara China. Data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 4 sebagai berikut.

**Gambar. 4**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Morowali Utara**  
**Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020**



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2020 (Diolah Kembali)

**b. PDRB per Kapita**

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari kinerja ekonomi makro daerah ini. Dimana, laju perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah (*value added*) yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/regional dalam kurun waktu satu Tahun. PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Gambaran perekonomian Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar Rp.8.317.377 juta yang mengalami peningkatan cukup signifikan hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.11.203.762,00 juta. Data PDRB ADHB

Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 14 sebagai berikut.

**Tabel. 14**  
**Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara**  
**Menurut Lapangan Usaha 2016-2020**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,926,632	3,140,097	3,294,253	3,589,213	3,514,655
B.Pertambangan dan Penggalian	1,628,270	2,426,973	3,349,266	4,284,692	3,667,845
C.Industri Pengolahan	97,574	137,969	152,035	166,174	280,834
D.Pengadaan Listrik dan Gas	853	967	1,108	1,241	1,262
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,306	4,938	5,719	6,161	6,694
F.Konstruksi	2,260,986	1,869,649	1,576,967	1,798,184	1,824,664
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	571,958	641,277	721,382	786,448	770,822
H.Transportasi dan Pergudangan	28,352	31,259	34,947	39,140	27,021
I.Penyediaan komodasi dan Makan Minum	20,103	21,812	23,907	26,776	24,117
J.Informasi dan Komunikasi	162,332	182,041	202,627	226,942	244,176
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	34,716	40,155	45,777	51,271	54,411
L.Real Estat	150,249	160,163	172,438	193,131	186,307
M,N.Jasa Perusahaan	1,231	1,410	1,630	1,826	1,795
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184,604	205,588	231,248	258,998	270,077
P.Jasa Pendidikan	124,492	137,357	151,068	163,491	155,291
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,863	75,640	81,915	91,744	101,754
R,S,T,U.Jasa lainnya	51,857	61,237	73,038	81,802	72,038
<i>Produk Domestik Regional Bruto</i>	<i>8,317,377</i>	<i>9,138,534</i>	<i>10,119,324</i>	<i>11,767,234</i>	<i>11,203,762</i>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Kabupaten Morowali Utara memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Kondisi ini berdampak positif bagi perekonomian daerah, bahkan Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi salah satu sektor andalan. Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2016 didominasi 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.2.929.922 Juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp.2.260.985,90 juta; Sektor Pertambangan dan Pengalihan Rp.1.658.274 juta, sementara itu kontribusi Sektor Industri masih rendah hanya sebesar Rp.97.573,70 juta. Pada Tahun 2020, ketiga sektor tersebut masih tetap dominan yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.3.667.847; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar RP.3.514.655, dan Sektor Konstruksi sebesar Rp.1.824.664. Sementara itu, PDRB ADHK 2010 sebesar Rp.6.247.646 juta tahun 2016 meningkat di Tahun 2017 menjadi sebesar Rp.6.709.481 juta dan Tahun 2020 mencapai sebesar Rp.8.072.844. Dalam periode Tahun 2016-2020 terdapat tiga sektor dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2016, PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian sebesar Rp.2.154.314,10 juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp1.527.787,70 juta; Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.1.476.337,90 juta. Pada Tahun 2017, ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor berkontribusi tinggi dalam PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara. Hingga Tahun 2020, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.3.298.171,00 juta; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.2.452.785,00 juta; dan Sektor Konstruksi sebesar Rp 1.001.259,00 juta. Ketiga sektor tersebut dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, meski beberapa Tahun terakhir terjadi pergeseran sektor dominan dalam membentuk PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Utara. Seiring dengan mulai dikelolanya JOB Pertamina *Medco-Expan* Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan juga meningkatnya ekspor nikel hasil produksi perusahaan pertambangan yang tersebar di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat. Data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 15 sebagai berikut.

**Tabel. 15**  
**Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara**  
**Menurut Lapangan Usaha 2016-2020**

<b>LAPANGAN USAHA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,150,929	2,244,266	2,335,110	2,498,729	2,452,785
B.Pertambangan dan Penggalan	1,445,338	2,077,335	2,590,188	3,072,171	3,298,124
C.Industri Pengolahan	76,604	97,665	103,446	107,123	155,532
D.Pengadaan Listrik dan Gas	989	1,055	1,139	1,242	1,327
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,136	3,490	3,928	4,019	3,741
F.Konstruksi	1,522,788	1,204,974	96,247	1,039,080	1,001,259
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393,551	414,272	434,899	444,071	415,666
H.Transportasi dan Pergudangan	21,155	22,527	24,273	25,906	17,175
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,828	14,779	15,940	16,842	14,122
J.Informasi dan Komunikasi	143,198	158,367	174,083	185,941	202,607
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	25,470	28,100	30,378	32,405	34,518
L.Real Estat	109,577	111,936	115,326	120,077	117,024
M,N.Jasa Perusahaan	911	998	1,106	1,178	1,155
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	129,971	138,674	149,631	161,781	161,118
P.Jasa Pendidikan	83,694	89,475	93,718	98,287	93,181
Q.Jasa Kesehatan	48,678	51,782	54,527	58,405	61,759

dan Kegiatan Sosial					
R,S,T,U.Jasa lainnya	35,444	38,834	43,026	44,368	41,753
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,205,261</b>	<b>6,698,529</b>	<b>7,133,186</b>	<b>7,911,624</b>	<b>8,072,844</b>

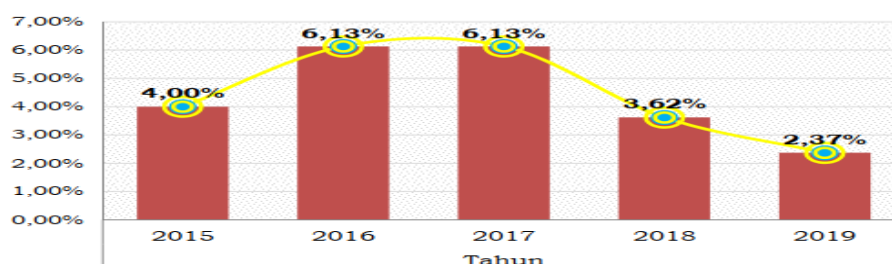
Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

### c. Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebanidayabeli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Data laju inflasi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 5. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2015 inflasi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 4,00 persen; meningkat ahun 2017 menjadi 6,13 persen. Namun, periode Tahun 2018- 2019 inflasi menurun menjadi sebesar 2,37 persen.

**Gambar. 5**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

**d. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Indikator digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah distribusi pendapatan yang diterima masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks gini berada di antara 0-1, bila nilai indeks gini bernilai 0, maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna, dan indeks gini bernilai 1, maka ketidakmerataan distribusi pendapatan sempurna.

Kesenjangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia dikategorikan: a) **Tinggi**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b) **Sedang**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan; c) **Rendah**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17persenbagian pendapatan.

Sementara itu untuk kriteria Indeks Gini, yakni jika rasio Gini=0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika rasio Gini=1, berarti pembagian pendapatan timpang total. Menurut kriteria H.T. Oshima; Ketimpangan "rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,3; Ketimpangan "sedang" bila indeks Gini antara 0,3-0,4; dan Ketimpangan "tinggi" bila indeks Gini di atas 0,4. Data indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2023-2024 terdapat pada tabel 16 sebagai berikut. Data rasio gini 2019 dan 2020 belum tersedia.

**Tabel. 16**  
**Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2023-2024**

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota	
	2023	2024
Sulawesi Tengah	0,304	0,301
Banggai Kepulauan	0,272	0,276
Banggai	0,283	0,316
Morowali	0,281	0,275
Poso	0,265	0,247
Donggala	0,237	0,251
Tolitoli	0,345	0,277
Buol	0,258	0,266

Parigi Moutong	0,298	0,25
Tojo Una-una	0,262	0,244
Sigi	0,281	0,246
Banggai Laut	0,244	0,221
Morowali Utara	0,284	0,245
Kota Palu	0,324	0,337

Kondisi indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara cukup baik, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan indeks Gini Rasio pada tahun 2023 sebesar 0,284 dan pada tahun 2024 sebesar 0,245; dan lebih rendah dari rata-rata provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar 0,304 dan pada tahun 2024 sebesar 0,301, dan indeks gini Morowali Utara tergolong kedalam ketimpangan sedang, keadaan ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Morowali Utara masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk. Indeks Gini tertinggi di Kota Palu sebesar 0,324 pada tahun 2023 dan sebesar 0,337 pada tahun 2024. Sedangkan daerah dengan indeks Gini terendah adalah Kabupaten Parigi motong dan Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2024.

### **1.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026**

Hasil rumusan isu strategis Daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah ini akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan berikut program-program pembangunannya. Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya memperhatikan penelaan Isu-Isu strategis KLHS RPJMD 2021-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Penanganan Penyebaran Dan Pemulihan Pasca Covid-19
2. Peningkatan Ekonomi Yang Inklusif Dan Pengentasan Kemiskinan

3. Era Industri 4.0 Dan Teknologi Digital
4. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Berkualitas
6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kompetensi ASN
7. Mitigasi Bencana Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
8. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19**

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, *tracing*, *testing*, *treatment*, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi,

melakukan jaring pengaman sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2020, stimulus fiskal juga di perekonomian Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp.695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel. Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjagajarak, dan menghindari kerumunan massal. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

**b. Peningkatan Ekonomi yang Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan**

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berkualitas atau inklusif jika pertumbuhan ekonomi berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin

dan terjadi pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan jugai deologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Kabupaten Morowali Utara masih memiliki isu strategis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun penurunan angka kemiskinannya cenderung melambat. Padasisilain, Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu tantangan penurunan angka kemiskinan adalah masih banyaknya masyarakat miskin, atau golongan menengah kebawah, yang termasuk masyarakat miskin berbasis Komunitas Adat Terpencil(KAT). Hal ini terlihat dari periode tahun 2015-2019, penurunan persentase penduduk miskin yang sangat kecil yakni hanya sebesar 1,83 persen. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk miskin diKabupaten Morowali Utara sebanyak 19.810 orang atau sebesar 16,91 persen. Setiap Tahun angka kemiskinan diKabupaten Morowali Utara, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 15,08 persen atau sebanyak 19.250 jiwa. Faktor penyebab tingginya kemiskinan diKabupaten Morowali Utara adalah masalah kulturan/budaya. Sejalan dengan hal itu

konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali Utara.

**c. Era Industri 4.0 dan Teknologi Digital**

Saat ini merupakan era "*sharing & platform based*". Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi dan, (2) model bisnis berbasis platform. Model bisnis platform based misalnya; (1) Perusahaan ,transportasi, tanpa kendaraan, (2) Penyedia "*breakingnews*" tanpa menyusun berita, (3) Penyedia *photo sharing* tanpa membuat foto, (4) Jasa komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi, (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki inventory, (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar, (7) Media populer tanpa membuat content, (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapat virtual dan pengelolaan kantor dari jarak jauh, (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan). Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Tantangan saat ini adalah untuk mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah, maupun Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, juga diperlukan

Langkah-langkah mengkombinasikan industri 4.0 dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online, *Workfrom Home* (WFH) dan budaya rapat daring (*online*) menjadi sebuah kebiasaan baru di dalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan. Transaksi ekonomi juga dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidakkah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital ini berhasil mengurangi kecepatan laju penularan virus corona keseluruhan umat manusia, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali Utara akan berjalan seiring dengan adaptasi pada teknologi Pendidikan saat ini.

**d. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah**

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2015 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 409,88 Km atau 44,84 persen dari panjang jalan keseluruhan 921,39 Km, data menurun sangat signifikan Tahun 2016 menjadi

sebesar 12,67 persen atau sepanjang 120,4 Km dari panjang jalan 950,30 Km. Hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,44 persen. Perkembangan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Morowali Utara befluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2015 jaringan irigasi sebesar 38,29 persen, meningkat Tahun 2017 menjadi sebesar 48,77 persen, dan menurun pada periode Tahun 2018-2019 masing-masing menjadi sebesar 47,58 persen dan sebesar 47,09 persen. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, di sisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat di perlukan. Pembangunan sarana dan Prasarana perkantoran dan Pelayanan publik juga masih diperlukan di masa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali Utara baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun di desa.

**e. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas**

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tatakelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dimasa mendatang. Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam periode Tahun 2021-2026. Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan:1)

Standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2) rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya kearah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmented dan mengedepankan ego sektoral; 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/pelaku swasta dalam bentuk kelembagaan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut; 5) aplikasi layanan online tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini. Disamping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

**f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN**

Kualitas Sumber daya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat

dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), dan aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM. IPM Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan. Kondisi IPM kabupaten Morowali Utara 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 IPM Kabupaten Morowali Utara sebesar 66,00; Tahun 2016 menjadi sebesar 66,57; Tahun 2017 menjadi sebesar 67,35 dan hingga Tahun 2019 sebesar 68,45.

**Gambar. 6**  
**Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota**  
**Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS, 2020

Pada akhir Tahun 2020, sejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Morowali Utara telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada seluruh aspek pembangunan, sehingga diperkirakan dampak dari COVID-19 tersebut akan mempengaruhi terhadap sasaran pembangunan kemungkinan terkoreksi, termasuk juga Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali Utara juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi dan industri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

#### **g. Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Kabupaten Morowali Utara memiliki curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa. Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana antara lain:

1. Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Kawasan rawan gelombang pasang rawan berada di Kecamatan Soyo Jaya,

Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.

Kawasan Rawan Banjir. Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.

3. Kawasan Rawan Gempa Bumi. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup terkait dokumen perencanaan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 telah diselenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah. Namun, terdapat penurunan kualitas lingkungan (environmental degra-dation), di daerah Kabupaten Morowali Utara ditemukan pada daerah eks tambang yang tidak direklamasi, sehingga menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor dan banjir (khususnya pada musim penghujan) daerah rawan bencana tersebut dapat di masukkan ke dalam daerah lahan kritis, maupun ditetapkan menjadi daerah rawan bencana.

#### **h. Pelaksanaan dan Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDG's).**

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negaranegara di dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari

konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. Pertama, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki aspek-aspek yang perlu diselesaikan secara bersama oleh dunia global antara lain: kehidupan yang sehat dan layak, keamanan dan ketahanan pangan, sumber air bersih, energi yang aman, ekosistem yang produktif dan sehat, kebijakan yang berpihak terhadap komunitas. Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali Utara pada khususnya. Metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJM Nasional 2020-2040 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara guna mendukung Pencapaian RAD SDGs Provinsi Sulawesi Tengah antara lain terkait angka stunting yang masih tinggi dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah Morowali Utara siap mendukung Major Project Stunting dan

mengikuti SE Mendagri No. 440/2701/SJ Ttg Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan penyusunan Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.

**Gambar. 7**  
**Keterkaitan Isu-Isu startegis International, Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara**



#### 1.4. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Kecamatan. Adapun susunannya sebagai berikut:

##### 1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

- 1) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Membawahi 3 (tiga) bagian:
  - Bagian Pemerintahan;
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - Bagian Hukum;
- 2) Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan, Membawahi 3 (tiga) bagian:
  - Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
  - Bagian Administrasi Pembangunan;
  - Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Asisten Administrasi Umum. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian:
  - Bagian Umum
  - Bagian Organisasi
  - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan;

## **2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

- Bagian Umum dan Perlengkapan
- Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- Bagian Keuangan

## **3. Inspektorat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara membawahi 3 (tiga) Inspektur Pembantu yaitu:

- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah IV

#### **4. Dinas—Dinas Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah;
- d. Dinas Perhubungan Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Dinas Sosial Daerah;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
- h. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
- p. Dinas Perpustakaan Daerah;
- q. Dinas Perikanan Daerah;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah;

#### **5. Badan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- Badan Pendapatan Daerah;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

## **6. Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Kecamatan. Kecamatan terdiri dari:Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

1. Kecamatan Petasia;
2. Kecamatan Lembo;
3. Kecamatan Mori Atas;
4. Kecamatan Bungku Utara;
5. Kecamatan Soyo Jaya;
6. Kecamatan Mamosalato;
7. Kecamatan Mori Utara;
8. Kecamatan Lembo Raya;
9. Kecamatan Petasia Timur;
10. Kecamatan Petasia Barat;

## **7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum, serta Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, terdiri atas:

- a. Puskesmas Pandauke (Kecamatan Mamosalato)
- b. Puskesmas Potowe Indo (Kecamatan Mamoslato)
- c. Puskesmas Baturube (Kecamatan Bungku Utara)
- d. Puskesmas Wongko Ndaya (Kecamatan Bungku Utara)
- e. Puskesmas Tambayoli (Kecamatan Soyo Jaya)
- f. Puskesmas Panca Makmur (Kecamatan Soyo Jaya)
- g. Puskesmas Kolonodale (Kecamatan Petasia)
- h. Puskesmas Molino (Kecamatan Petasia Timur)
- i. Puskesmas Anuntoluwu (Kecamatan Petasia Barat)
- j. Puskesmas Peratoa Petumbea (Kecamatan Lembo Raya)
- k. Puskesmas Beteleme (Kecamatan Lembo)
- l. Puskesmas Tomata (Kecamatan Mori Atas)
- m. Puskesmas Le'e (Kecamatan Mori Atas)
- n. Pukesmas Mayumba (Kecamatan Mori Utara)
- o. UPT SPAM
- p. Rumah Sakit Umum Daerah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama-sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026. ini menegaskan semangat, tekad yang kuat dan bulat, cita-cita dan harapan rakyat Morowali Utara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera sebagai dasar perumusan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026. Hal ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, skenario pembangunan, dan prioritas daerah lima tahun kedepan sebagai acuan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Adapun penjelasan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

##### **a. Visi**

Perumusan visi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, khususnya pada tahapan pembangunan jangka panjang. Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah langkah perlima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai “Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penganggaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berdasarkan kebutuhan daerah, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode keperiode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan isi pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD Kabupaten

Morowali Utara Periode 2021-2026 merupakan tahap terakhir dalam pentahapan pembangunan dalam RPJPD 2005-2025, dimana telah dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disajikan dalam gambar 8 sebagai berikut.

**Gambar. 8**  
**Tahapan dan Prioritas Pembagunan**  
**RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025**



Agar memiliki arah dan fokus yang jelas, pembangunan jangka panjang di Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan tema pembangunan dimasing-masing tahapan pembangunan. Perumusan tema pembangunan sesuai prioritas dan arah kebijakan pembangunan disajikan dalam Gambar 14 sebagai berikut. Adapun Tema Pembangunan Lima Tahun Ke-4 (2021-2025) adalah "Mempertahankan Pelayanan Publik, Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Memperkokoh Infrastruktur Strategis Daerah dan Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh" Tema tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yang kemudian disinergikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yang memiliki tekad dan semangat yang sejalan dengan arahan pembangunan jangka panjang daerah.

**Gambar. 9**  
**Tema Pembangunan**  
**RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025**



Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA  
 YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang ditiap desa dan kecamatan. Disamping itu perubahan juga didorong kearah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujudkan dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

**Tabel. 17**  
**Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara**

<b>Visi RPJMN 2020-2024</b>	<b>RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026</b>	<b>RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025</b>	<b>RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026</b>
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Gerak Cepat Menuju Suawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

Penjelasan rinci dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 18**  
**Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026**

	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang

		<p>dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar mengajar. Serta didukung dengan pendidikan karakter.</p>
	Sejahtera	<p>Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p>

## b. Misi

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
- (2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
- (4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
- (5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tatakelola pemerintahan yang baik.

**Gambar .10**  
**Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan**  
**Kabupaten Morowali 2021-2026**



Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk:
  - a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata disemua kecamatan.

- b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
  - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
  - d. memenuhi standar pelayanan minimal dibidang kesehatan.
- (2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :
- a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
  - b. Mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
  - c. Meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
  - d. Meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk:
- a. Meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
  - b. Memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
  - c. Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
- (4) Meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk:
- a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
  - b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
  - c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.

- d. meningkatkan integrasi antar moda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya dipusat-pusat kegiatan lokal.
  - e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.
- (5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :
- a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
  - b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
  - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
  - d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
  - e. meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

**Gambar. 11**  
**Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan**  
**Kabupaten Morowali 2021-2026**



Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, disajikan pada Tabel 17, sebagai berikut:

**Tabel. 19**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara**  
**2021-2026**

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
	2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
	4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
	5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian Misi yang menjadi penjabaran dari Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 yaitu "Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan", sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Periode 2005-2025.

Berikut ini adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahap ke-4 RPJPD atau lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali Utara.

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
- b. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kompetensi sumber daya aparatur;

- c. Peningkatan Infrastruktur;
- d. Tertatanya Sarana dan Prasarana pelabuhan laut sebagai gerbang ekonomi maritim;
- e. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal;
- f. Peningkatan daya saing dan peningkatan investasi daerah;
- g. Pembangunan inklusif dan lingkungan berkelanjutan.

Sementara sasaran pokok RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahap 4 (2021-2025) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
- b. Terbentuknya sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;
- c. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dari kabupaten sampai desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- e. Meningkatkan daya saing daerah;
- f. Meningkatkan investasi daerah;
- g. Pembangunan inklusif yang merata;
- h. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan supremasi hukum;
- i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- j. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah;
- k. Tersedianya akses informasi dan komunikasi;
- l. Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- m. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- n. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan alam;
- o. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana;
- p. Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana.

Keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 20, sebagai berikut:

**Tabel. 20**  
**Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara**  
**Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara**  
**Periode 2021-2026**

<b>Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025</b>	<b>Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026</b>
Misi 1: <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis (good governance),</i>	Misi 5. <i>Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
Misi 2: <i>Mewujudkan pelayanan publik (publicservices) yang merata, terjangkau dan berkualitas</i>	Misi 5. <i>Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
Misi 3: <i>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), produktivitas daerah (regional productivity) dan iklim investasi (investment climate)</i>	Misi 1. <i>Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.</i> Misi 2. <i>Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</i>
Misi 4: <i>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang baik dan memadai,</i>	Misi 4. <i>Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah</i>
Misi 5: <i>Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan</i>	Misi 3. <i>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah</i>
Misi 6: <i>Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam(natural resources) dan lingkungan yang berkelanjutan</i>	Misi 3. <i>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah</i>

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, di samping berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, maka perlu pula memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJM Nasional 2020-2024, sehingga penjabaran program yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara menjadi bagian integral dari program provinsi dan nasional. Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 sebagai arah dan kebijakan pembangunan yang selaras, sebagaimana disajikan pada Tabel 21 dan Tabel 22 sebagai berikut:

**Tabel. 21**  
**Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**

<b>Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026</b>	<b>Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026</b>
Misi 1. <i>Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.</i>	Misi 1. <i>Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.</i>  Misi 2. <i>Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</i>
Misi 2. <i>Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.</i>	Misi 5. <i>Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
Misi 3. <i>Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan</i>	Misi 3. <i>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah</i>
Misi 4. <i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.</i>	Misi 4. <i>Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah</i>
Misi 5. <i>Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.</i>	Misi 4. <i>Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah</i>
Misi 6. <i>Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan</i>	Misi 3. <i>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas</i>

<i>berkelanjutan.</i>	<i>masyarakat mengelola potensi wilayah</i>
Misi 7. <i>Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.</i>	Misi 5. <i>Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
Misi 8. <i>Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.</i>	Misi 1. <i>Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.</i> Misi 2. <i>Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</i>
Misi 9. <i>Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.</i>	Misi 5. <i>Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>

**Tabel. 22**  
**Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**

<b>Misi RPJMN 2020-2024</b>	<b>Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026</b>
Misi 1. <i>Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</i>	Misi 1. <i>Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.</i> Misi 2. <i>Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</i>
Misi 2. <i>Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.</i>	Misi 3. <i>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah</i>
Misi 3. <i>Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</i>	Misi 4. <i>Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah</i>
Misi 4. <i>Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.</i>	Misi 4. <i>Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah</i>
Misi 5. <i>Kemajuan Budaya yang</i>	Misi 2. <i>Meningkatkan aksesibilitas dan</i>

<i>Mencerminkan Kepribadian Bangsa</i>	<i>mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</i>
<i>Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</i>	<i>Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
<i>Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Ama pada Seluruh Warga.</i>	<i>Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
<i>Misi 8. Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.</i>	<i>Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>
<i>Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</i>	<i>Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.</i>

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Morowali Utara 2021-2026, maka keterkaitan antara agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

- (1) Misi Kesatu: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga, kelima, keenam, dan kesepuluh;
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keempat, kelima, dan kesepuluh;
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu dan kedua dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh;

- (4) Misi Keempat: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional kelima dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, kesepuluh, dan kesebelas;
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional keempat dan ketujuh dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, ketiga, keempat, kesepuluh dan kesebelas;

## 2.2. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

### • Keselarasan Kinerja Misi-1

<b>Misi I</b>	Meningkatkan Aksesibilitas (keterjangkauan fisik), Afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata	
	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat

### • Keselarasan Kinerja Misi-2

<b>Misi II</b>	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
	<b>Tujuan 1</b>	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
	<b>Sasaran 1</b>	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar
	<b>Tujuan 2</b>	Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender
	<b>Sasaran 2</b>	Meningkatnya partisipasi perempuan
	<b>Tujuan 3</b>	Meningkatkan inovasi, Keterampilan dan

	produktivitas angkatan Kerja	
	<b>Sasaran 3</b>	Meningkatnya peluang lapangan kerja
	<b>Sasaran 4</b>	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Keselarasan Kinerja Misi-3

<b>Misi III</b>	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah	
	<b>Tujuan 1</b>	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing
		<b>Sasaran 1</b> Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar
		<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)
	<b>Tujuan 2</b>	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas
		<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya kemandirian desa
	<b>Tujuan 3</b>	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan
		<b>Sasaran 4</b> Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
	<b>Tujuan 4</b>	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis
		<b>Sasaran 5</b> Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

- Keselarasan Kinerja Misi-4

<b>Misi IV</b>	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah	
	<b>Tujuan 1</b>	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
		<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah
		<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Konektivitas Wilayah

- Keselarasan Kinerja Misi-5

<b>Misi V</b>	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	<b>Tujuan 1</b>	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik
		<b>Sasaran 1</b> Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif

## **2.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **a. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

#### **1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Makro Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran makro daerah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang menekankan perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur strategis, pemerataan pembangunan antar wilayah; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan.

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan daerah Morowali Utara selama 2016-2020, pembangunan ekonomi daerah disusun dengan skenario optimis yang didukung dengan pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

- (1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
- (2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
- (3) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih dan meningkat dari minus 0,2 persen pada tahun 2020 menjadi 8,8 persen pada tahun 2026;

- (4) Tingkat pengangguran terbuka akan menurun dari 5,2 persen pada tahun 2020 menjadi 4,3 persen pada tahun 2026;
- (5) Tingkat kemiskinan akan menurun 14,1 persen pada tahun 2020 menjadi 8,5 persen pada tahun 2026;
- (6) Nilai IPM akan meningkat dari 68,5 pada tahun 2019 menjadi 72,6 pada tahun 2026.
- (7) Rasio Gini akan stabil di angka 0,30 pada tahun 2019 menjadi 0,30 pada tahun 2026.

**Tabel. 23**  
**Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2021-2026**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Jumlah penduduk	000 jiwa	122,7	124,5	126,4	128,3	130,2	132,2	134,2
2. Pertumbuhan Penduduk	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,2	5,0	6,8	7,2	7,7	8,2	8,8
4. Pertumbuhan PDRB perkapita	%	-1,7	3,5	5,3	5,7	6,2	6,7	7,2
5. Jumlah Angkatan Kerja	jiwa	67436	68447	69474	70516	71574	72647	73737
6. Pertumbuhan Angkatan	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	63959	65005	66139	67202	68353	69451	70566
8. Jumlah Pengangguran	jiwa	3507	3422	3335	3314	3221	3196	3171
9. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3
10. Jumlah penduduk Miskin	000 jiwa	18,38	14,94	14,41	13,47	12,63	11,90	11,41
11. Tingkat Kemiskinan	%	14,1	12,0	11,4	10,5	9,7	9,0	8,5
12. Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,5	69,0	69,7	70,4	71,1	71,8	72,6
13. Rasio Gini	indeks	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

## 2. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara selama Periode 2021-2026,

maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang telah direviu pada bulan Agustus Tahun 2022 oleh Tim SAKIP Kabupaten berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

**a. Tujuan**

**Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya), Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata.**

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup.

**Misi 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.**

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- Indeks Pendidikan.

Tujuan 2 : Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunanpembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- ndeks Pembangunan Gender.

Tujuan 3 : Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja, dengan Indikator Kinerja, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- Tingkat pengganguran terbuka.

- Indeks Inovasi Daerah.

**Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah.**

Tujuan 1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- PDRB.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- Indeks Desa Membangun.

Tujuan 3 : Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan 4 : Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- Indeks Rasa Aman.

**Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Keandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah**

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, dengan indikator Tujuan sebagai berikut:

- Indeks Infrastruktur Daerah.

**Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator Tujuan sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi.

**b. Sasaran**

**Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya), dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata.**

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup.

**Misi 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.**

Sasaran 1 : Meningkatkan jangkauan layanan, Pendidikan dasar, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Harapan Lama Sekolah (Tahun).
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun).

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi perempuan, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Gender.

Sasaran 3 : Meningkatnya peluang lapangan kerja, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Inovasi daerah, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- ndeks Inovasi Daerah;

**Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah.**

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- PDRB Perkapita.

Sasaran 2 : Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN), dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN).

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian desa, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Indeks Desa Membangun.

Sasaran 4 : Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 5 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Indeks Rasa Aman

**Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Keandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah.**

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- Indeks Infrastruktur Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Rasio Konektivitas Kabupaten.

**Misi 5: Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

- a. Predikat SAKIP;
- b. Indeks RB;
- c. Nilai LPPD;
- d. Opini BPK.

Selanjutnya misi dan tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel Indikator Kinerja Utama.

## **2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Untuk penyusunan LAKIP pemerintah daerah tahun 2024 mengacu pada RPJMD Periode 2021-2026 yang telah dilakukan revisi atau perbaikan RPJMD pada bab V halaman 18 s/d 49 tabel 5.4 berisi visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu sebelum perbaikan sebanyak antara lain:

- misi bupati sebanyak : 5

- tujuan bupati sebanyak : 15
- sasaran strategis bupati sebanyak: 48
- indikator bupati sebanyak : 81

Setelah dilakukan perbaikan oleh tim sakin kabupaten dan 10 dinas klaster utama melalui bimtek sakin yang narasumber dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 pada bulan agustus, maka tujuan, sasaran dan indikator tersebut dikurangi karena banyak indikator level eselon II yang dijadikan IKU Bupati. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Perbup No. 29 tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. dengan jumlah perubahan sebagai berikut:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 10
- indikator tujuan bupati sebanyak: 12
- sasaran strategis bupati sebanyak: 13
- indikator kinerja sasaran strategis Bupati sebanyak: 17

Berdasarkan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berdampak pada perubahan IKU eselon II atau kepala Perangkat Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra dengan mengemban visi dan misi pemerintah daerah yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"**. Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah akhir RPJMD Periode 2021-2026.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama dengan mengacu pada perubahan tujuan dan sasaran sebagaimana perubahan diatas sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dari 5 (lima) misi Bupati Morowali Utara terdapat 10 (sepuluh) tujuan dan 12 (Dua Belas) Indikator Tujuan dengan 13 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam **Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026**. Untuk diketahui bahwa dalam penyusunan SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 IKU Bupati Morowali Utara telah direvisi beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran pada saat perbaikan SAKIP oleh Tim SAKIP Kabupaten Morowali Utara yang difasilitasi oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 24**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 – 2026**

<b>Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan Daerah
<b>Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing</b>					
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata penduduk Morowali Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya partisipasi perempuan	Indeks Pembangunan Gender	IPG=IPM perempuan/IPM laki-laki	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya peluang lapangan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}_{\text{usia angkatan kerja}}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah
	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	$i = 2(2s \times 1 + 2s \times 2 + 2.5s \times 3 + 3.5s \times 4)$ Dimana: Sx1 = scor dimensi input Sx2 = scor dimensi proses Sx3 = scor dimensi output Sx4 = scor dimensi outcome	Bappelitbangda, dan Semua Perangkat Daerah
<b>Misi 3 :Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah</b>					
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	PDRB	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	PDRB Perkapita	Total PDRB Perkapita	Bappelitbangda
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	IDM =I/3(ISXIEXIL) Ket: IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten = (IKAX30%) + (IPUX30%) + (ITHX40%) IKLH: Indeks kualitas	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

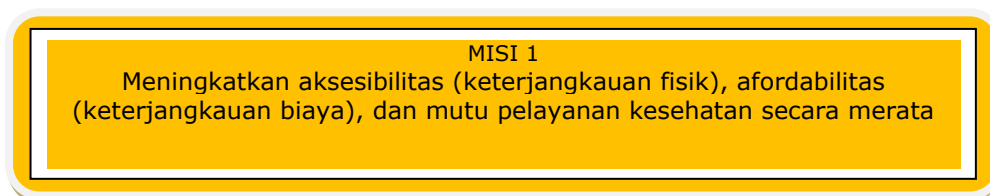
secara berkelanjutan				lingkungan hidup Kabupaten IKA: indeks kualitas air IPU: indeks kualitas udara ITH: indeks tutupan hutan	
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	Indeks Rasa Aman	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	Survei indeks pembangunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Dan Kesbangpol Daerah
<b>Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah</b>					
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	[40% {50% (50% kualitas sarpras jalan & jembatan + 50% kualitas PJU)} + {40% (50% saluran pengairan + 50% drainase kondisi baik)} + (10% pemenuhan bangunan sesuai standar)] + [20% {50% pengurangan sampah + 50% pengangkutan sampah } ] + 30% level of service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan konstruksi} + {30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30%edukasi proteksi kebakaran + 40% response time}) /2]	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, Dinas Perhubungan Daerah, BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.
		Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan Jalan)= Jumlah trayek yang dilayani	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dan Dinas Perhubungan Daerah

				<p>pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan)</li> </ul>	
<b>Misi 5 :Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik</b>					
Meningkatkan kinerja pelayanan Publik	Indeks RB	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan Penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Indeks RB	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah Delapan Area Perubahan
			Nilai LPPD	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Opini BPK	Opini BPK	BPKAD, Inspektorat Daerah, Semua Perangkat Daerah

## 2.5. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Daerah. Pohon Kinerja/Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 1 :



CASCADE KINERJA KESEHATAN												
Tujuan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
Indikator	Angka Harapan Hidup											
Sasaran	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat											
Indikator	Angka Harapan Hidup											
Sasaran PD	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan											
Indikator	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Denag Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV).
	DINAS KESEHATAN DAERAH											

## Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Misi 2 :

**MISI 2**  
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

CASCADE KINERJA PENDIDIKAN									
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat								
<b>Indikator</b>	Indeks Pendidikan								
<b>Sasaran</b>	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar								
<b>Indikator</b>	Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)								
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar		Meningkatnya Akses Pendidikan			Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidikan		Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	
<b>Indikator</b>	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	Angka Putus Sekolah	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APM SD/MI	APM SMP/MTs	Presentase Guru yang Memiliki Sertifikasi	Presentase Guru Berkualifikasi S1	Presentase Peningkatan Masyarakat Usia Produktif yang Memiliki Gelar S1/S2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH									

CASCADE KINERJA PEMBANGUNAN GENDER						
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender					
<b>Indikator</b>	Indeks Pembangunan Gender					
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Partisipasi Perempuan					
<b>Indikator</b>	Indeks Pembangunan Gender					
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatnya Partisipasi Perempuan					
<b>Indikator</b>	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Indeks Perlindungan Anak	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Pemakaian Persentase Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive
DINAS P2KB						

CASCADE KINERJA INOVASI DAERAH DAN ANGKATAN KERJA								
<b>Tujuan</b>	Meningkatnya Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja							
<b>Indikator</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
<b>Indikator</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				Indeks Inovasi Daerah			
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM Tenaga Kerja, Fresh Graduate dan Pengangguran Sesuai Potensi		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Hasil Kelitbang dan Inovasi Daerah yang Implementatif	
<b>Indikator</b>	Presentase Angkatan Kerja yang Memiliki Standar Kompetensi	Presentase Angkatan Kerja yang Ditempatkan	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Indeks inovasi Daerah	Persentase Hasil Kelitbang yang Diimplementasikan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH				BAPPALITBANGDA				

### Cascading Kinerja Misi 3 :

**MISI 3**  
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

CASCADE KINERJA EKONOMI						
<b>Tujuan</b>	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing					
<b>Indikator</b>	PDRB Laju Pertumbuhan Ekonomi					
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)		
<b>Indikator</b>	PDRB Perkapita			Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)		
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat, Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau
<b>Indikator</b>	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Persentase Jumlah Wisatawan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Jumlah Izin yang dikeluarkan
	Dinas Koperasi	Dinas Pariwisata	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	BAPPELITBANGDA	DPMPTSP	
CASCADE KINERJA PEMBANGUNAN DESA						
<b>Tujuan</b>	Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas					
<b>Indikator</b>	Indeks Desa Membangun					
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Kemandirian Desa					
<b>Indikator</b>	Indeks Desa Membangun					
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatnya Status Desa					
<b>Indikator</b>	Jumlah Desa Tertinggal					
	Jumlah Status Desa Maju					
	Jumlah Status Desa Mandiri					
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
CASCADE KINERJA SUMBER DAYA ALAM						
<b>Tujuan</b>	Memantapkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Secara Berkelanjutan					
<b>Indikator</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
<b>Sasaran</b>	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan					
<b>Indikator</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
<b>Sasaran PD</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
<b>Indikator</b>	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					

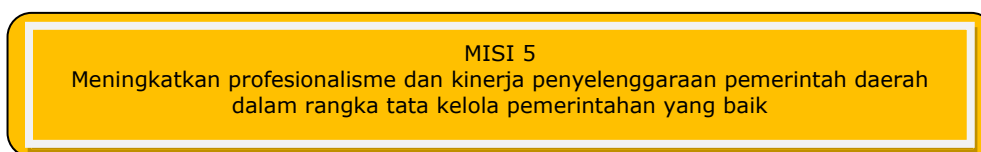
CASCADE KINERJA TRANTIBUM					
Tujuan	Mewujudkan Kondisi yang Tertib, Aman, dan Demokratis				
Indikator	Indeks Rasa Aman				
Sasaran	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah				
Indikator	Indeks Rasa Aman				
Sasaran PD	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat meningkat	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	
Indikator	Presentase Penyelesaian Konflik Sosial	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	KESBANGPOL			SATPOLPP DAN DAMKAR	

#### Cascading Kinerja Misi 4 :

**MISI 4**  
Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah

CASCADE KINERJA INFRASTRUKTUR									
Tujuan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah								
Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah								
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah						Meningkatnya Konektivitas Wilayah		
Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah						Rasio Konektivitas Wilayah		
Sasaran PD	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Meningkatnya KuaTerbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Meningkatnya kewaspadaan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Konektivitas Masyaraakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi
Indikator	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Rasio Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tangga Yang erkases Air Bersih Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Persentase Inigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Presentase keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalulintas Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi
	DINAS PUPR			DLHD	SATPOLPP DAN DAMKAR	BPBD	DISHUB		

## Cascading Kinerja Misi 5 :



CASCADE KINERJA AKUNTABILITAS							
Tujuan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik						
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi						
Sasaran	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif						
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi						
	Predikat SAKIP						
	Nilai LPPD						
	Opini BPK						
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Hasil Kelibngan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara
	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	Indeks Inovasi Daerah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Pendataan Dan Pengamanan Aset Daerah	Nilai Evaluasi LPPD	Indeks SPBE	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya
Indikator	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persentase Hasil Kelibngan yang Diimplementasikan	Kapabilitas APIP Level 3 Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Ditindak lanjuti Level Maturitas SPIP	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kategori Ketrebukaan Informasi Publik	
	BAPPELITBANGDA		INSPEKTORAT	BPKAD	SETDAKAB	DISKOMINFO	BKKPSDM

### 2.5.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor: 29 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 sebanyak 10 (sepuluh) Tujuan, 12 (dua belas) Indikator Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran. Pada penyusunan SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan perbaikan indikator yang didampingi oleh Kementerian PANRB. Untuk diketahui dari hasil revisi atau perbaikan tersebut ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dokumen

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali utara tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel. 25**  
**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**  
**UTARA TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	71,90
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60
		3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,10
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	4. Indeks Pembangunan Gender	98,30
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5 %
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	6. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 (Inovatif)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	7. PDRB Perkapita	10.45%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	8. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	11.950.000.000.000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	9. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,28
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	11. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)

11.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	12. Indeks Infrastruktur Daerah	0,522
12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	13. Rasio Konektivitas kabupaten	0,90
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	14. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		15. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		16. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		17. Opini BPK	WTP

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 sehingga pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 tetap memperhatikan Peraturan Daerah tersebut. Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 utamanya mengacu pada RPJMD periode Tahun 2021–2026 yang telah direviu/revisi oleh Tim SAKIP Kabupaten berdasarkan arahan dari Kementerian PAN RB pada tahun 2022 dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati. penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel. 26**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

<b>No</b>	<b>Tingkat Capaian</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan kinerja tahun ke-4 pada RPJMD periode tahun 2021–2026 yang telah direviu/revisi oleh Tim SAKIP Kabupaten. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 27**  
**Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis 1</b>				
<b>Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat</b>				
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup	71,90	72,19	100,40
Nilai Rata-Rata Sasaran				100,40
<b>Sasaran Strategis 2</b>				
<b>Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar</b>				
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60	12,44	98,73
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,10	9,13	100,32
Nilai Rata-Rata Sasaran				99,52
<b>Sasaran Strategis 3</b>				
<b>Meningkatnya Partisipasi Perempuan</b>				
1.	Indeks Pembangunan Gender	98,30	96,67	98,34
Nilai Rata-Rata Sasaran				98,34
<b>Sasaran Strategis 4</b>				
<b>Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja</b>				

1.	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,5	2,23*	49,55
Nilai Rata-Rata Sasaran				49,55
<b>Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>				
1.	Indeks Inovasi daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	39,99 poin (Inovativ)	66,65
Nilai Rata-Rata Sasaran				66,65
<b>Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah</b>				
1.	PDRB Perkapita	10.45%	23,04*	220,47
Nilai Rata-Rata Sasaran				220,47
<b>Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi</b>				
1.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata	11.950.000.000.000	17.716.666.908.464	148,25
Nilai Rata-Rata Sasaran				148,25
<b>Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kemandirian Desa</b>				
1.	Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,7538 Maju	106,58
Nilai Rata-Rata Sasaran				106,58
<b>Sasaran Strategis 9 Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan</b>				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,28	79,99	98,41

Nilai Rata-Rata Sasaran				98,41
<b>Sasaran Strategis 10</b> <b>Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah</b>				
1.	Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A
Nilai Rata-Rata Sasaran				0
<b>Sasaran Strategis 11</b> <b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah</b>				
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	0,522	1,262	241,76
Nilai Rata-Rata Sasaran				241,76
<b>Sasaran Strategis 12</b> <b>Meningkatnya Konektivitas Wilayah</b>				
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,90	0,61	67,77
Nilai Rata-Rata Sasaran				67,77
<b>Sasaran Strategis 13</b> <b>Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif</b>				
1.	Predikat SAKIP	>70-80/BB	60,13/B	75,16
2.	Indeks RB	>70-80/BB	69,21/B	86,51
3.	Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
4.	Opini BPK	WTP	WTP*	100
Nilai Rata-Rata Sasaran				87,22

*Keterangan:*

\* : Realisasi menggunakan realisasi 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;

- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 8 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target;

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Provinsi sebagian menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2024 belum dirilis. Selanjutnya untuk diketahui bahwa pada laporan kinerja tahun 2024 ini terdapat beberapa indikator kinerja yang diperbaiki targetnya karena pada laporan kinerja tahun 2022 terdapat kekeliruan cara penghitungan dan penentuan target, antara lain sebagai berikut:

- 1) Indikator Indeks Pembangunan Gender, targetnya terlalu rendah sampai akhir periode RPJMD sementara realisasi tahun 2022 sudah melebihi target.
- 2) Indikator PDRB Perkapita, pada indikator ini terdapat kekeliruan menentukan target dan pengambilan nilai realisasi, untuk target seharusnya menuangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK (persen) dalam triliunan rupiah, sementara tahun lalu menuangkan realisasi dalam milyaran rupiah. Untuk laporan tahun ini telah direvisi.
- 3) Indikator Indeks Desa Membangun, pada indikator tahun 2021 dan 2022 hanya menampilkan jumlah status desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal, sementara untuk laporan kinerja tahun 2023 disamping menampilkan jumlah status desa juga menuangkan capaian rata-rata IDM.
- 4) Indikator Indeks Infrastruktur Daerah, pada laporan tahun 2022 terdapat kekeliruan penghitungan target Indeks Infrastruktur Daerah sehingga akan kelihatan tahun sebelumnya targetnya lebih besar dengan tahun yang akan datang, akan tetapi pada laporan tahun 2023 dan 2024 sampai akhir RPJMD telah dilakukan revisi target.

### 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja.

#### **Sasaran Strategis 1** **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

**Tabel. 28**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**“Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat”**  
**Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	71,90	72,19	100,40

#### 1.1 Angka Harapan Hidup

Sasaran Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator kineja sasaran yaitu Angka Harapan Hidup. Bahwa Angka Harapan Hidup waktu lahir (*expectation of life at birth*) yang biasanya dilambangkan dengan simbol  $e_0$  dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 72,19% dari target yang ditetapkan sebesar 71,90% pada tahun 2024.

Target dan Realisasi serta capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 29**  
**Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja**  
**Angka Harapan Hidup Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	71,90	72,19	100,40

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2024 Kabupaten Morowali Utara dalam 4 tahun terakhir yaitu sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel. 30**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1. Angka Harapan Hidup	69,71	69,23	69,97	72,19

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup (AHH) realisasi sebesar 69,71 dan tahun 2022 realisasi menurun sebesar 69,23, tahun 2023 realisasi meningkat sebesar 69,97, begitu juga pada tahun 2024 realisasi semakin meningkat sebesar 72,19. Jika dibandingkan tahun 2024 dengan tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 2,48 poin, selanjutnya dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,96 poin, dan selanjutnya dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,22 hal ini mencerminkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mencapai target, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Morowali Utara ke arah yang lebih baik, tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

Selanjutnya capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 jika dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

**Tabel. 31**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup**  
**Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.1. Angka Harapan Hidup	71.50	72,19	100,96

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 telah mencapai target akhir RPJMD pada tahun 2026, sehingga nampak kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mencapai target dengan melakukan perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Morowali Utara ke arah yang lebih baik, tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

Selanjutnya capaian Indikator Kinerja Sasaran Angka Harapan Hidup Kabupaten Morowali Utara tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel. 32**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup**  
**Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1. Angka Harapan Hidup	72,19	70.84

Pada tabel diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Morowali Utara lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan itu merupakan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yaitu "Sehat, Cerdas dan Sejahtera".

**Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar**

Capaian indikator-indikator sasaran "Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 33**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**"Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar"**  
**Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,60	12,44	98,73
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9,10	9,13	100,32

Sumber: BPS Morowali Utara Dalam Angka 2024 (diolah kembali)

**1.1 Harapan Lama Sekolah.**

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut merupakan capaian angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik “Morowali Utara Dalam Angka”, menunjukkan bahwa nilai realisasi pada indikator Harapan Lama Sekolah tahun 2024 sebesar 12,44 dari target yang direncanakan sebesar 12,60 dengan capaian yaitu sebesar 98,73%. Dengan realisasi Harapan Lama Sekolah tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD dan SMP sekarang di Kabupaten Morowali Utara punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan SMA maupun Diploma I (DI). Target dan Realisasi serta capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 34**  
**Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi**  
**Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 . Harapan Lama Sekolah	12,60	12,44	98,73

*Sumber: BPS Morowali Utara Dalam Angka 2024 (diolah kembali)*

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dengan tahun 2024 maka tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 semakin meningkat, sebagaimana nampak pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2021 s.d 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 35**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1. Harapan Lama Sekolah	12,25	12,28	12,29	12,44

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Kabupaten Morowali Utara Harapan Lama Sekolah (HLS) selalu mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. pada tahun 2021 harapan lama sekolah realisasi sebesar 12,25, tahun 2022 realisasi sebesar 12,28, tahun 2023 realisasi sebesar 12,29 dan selanjutnya harapan lama sekolah tahun 2024 realisasi sebesar 12,44. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka tahun 2024 mengalami peningkatan 0,16 poin, dan selanjutnya jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin. Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2024 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

**Tabel. 36**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah**  
**Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1.1. Harapan Lama Sekolah	12.80	12,44	97,18

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2021-2026 target akhir RPJMD tentang Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 12.80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 12.44 dengan capaiannya 97.18% belum mencapai target RPJMD sehingga masih terdapat kekurangan 0,36 poin. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan agar Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

- Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus

- yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- o Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- o Dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

Selanjutnya Harapan Lama Sekolah jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 mencapai 12.44 (tahun) dan lebih rendah dari Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 13.34 (tahun) pada tahun 2024, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 37**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah**  
**Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1. Harapan Lama Sekolah	12,44	13,34

### 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk

dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel. 38**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2. Rata-Rata Lama Sekolah	9,10	9,13	100,32

*Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara 2024 (diolah kembali)*

Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2024 di kabupaten Morowali Utara realisasi sebesar 9,13 atau capaiannya sebesar 100,32% dari target yang ditentukan sebesar 9,10 pada tahun 2024. Dengan realisasi Rata-Rata Lama Sekolah ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Morowali Utara rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Selain itu secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah tersebut sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 tahun.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi ditamatkan dan tingkat pendidikan sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2021 s.d tahun 2024 meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 tren capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 semakin meningkat, sebagaimana nampak pada tabel berikut:

**Tabel. 39**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2023
1.3. Rata-Rata Lama Sekolah	8,72	8,75	8,94	9,13

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Morowali Utara jika dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2021 s.d tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Pada tahun 2021 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) realisasi sebesar 8,72, jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar 9,13 mengalami peningkatan 0,41 poin, selanjutnya pada tahun 2022 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) realisasi sebesar 8,75 jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar 9,13 mengalami peningkatan 0,38 poin, dan selanjutnya pada tahun 2023 realisasi sebesar 8,94, jika dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar 9,13 mengalami peningkatan 0,19 poin. RLS terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya perbandingan capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut:

**Tabel. 40**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan**  
**Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi	Capaian (%)
1.2. Rata-Rata Lama Sekolah	9.30	9.13	98,17

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 target Rata-rata Lama Sekolah pada akhir periode (tahun 2026) adalah sebesar 9.30, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 9.13 atau capaiannya 98.17%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan minimal 0,17 poin dari target akhir RPJMD agar kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut dapat tercapai. Adapun upaya yang akan dilakukan agar Rata-Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu selain intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang Sekolah Dasar dan SMP.

Selanjutnya angka Rata-Rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 mencapai 9.13 dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mencapai 9,04. RLS Kabupaten Morowali Utara berada diatas angka Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 0,09 poin pada tahun 2024, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 41**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.2. Rata-rata Lama Sekolah	9.13	9.04

**Sasaran Strategis 3**  
**Meningkatnya Partisipasi Perempuan**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Partisipasi Perempuan” adalah sebagai berikut:

**Tabel. 42**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**“Meningkatnya Partisipasi Perempuan”**  
**Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	98,30	96,67*	98,34

Keterangan: \* Realisasi merupakan realisasi tahun 2023

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024

### **1.1 Indeks Pembangunan Gender**

*Gender Development Indeks (GDI)* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas gender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum. Untuk laporan kinerja tahun 2024 realisasi merupakan realisasi tahun 2023 karena sampai disusunnya laporan kinerja belum dirilis dalam BPS Morowali Utara maupun BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 43**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	98,30	96,67*	98,34

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini menggunakan realisasi tahun 2023, nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 yaitu sebesar 96,67 dan target IPG tahun 2024 sebesar 98,30 capaiannya sebesar 98,34%.

Selanjutnya perbandingan perkembangan IPG dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 44**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1. Indeks Pembangunan Gender	95,98	96,53	96,53*	96,67*

Keterangan: \* Realisasi merupakan realisasi tahun 2022 dan 2023 BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender realisasi sebesar 95,98, selanjutnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar 96,53% karena data merupakan data yang sama yaitu data tahun 2022, sementara untuk realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024

menggunakan data BPS tahun 2023 karena dalam BPS tahun 2024 menuangkan nilai tahun 2023, sementara nilai indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 adalah nilai tahun 2023 yaitu sebesar 96,67%, ini berarti bahwa nilai realisasi IPG tahun 2024 masih menuangkan data BPS tahun sebelumnya.

Selanjutnya Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2024 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

**Tabel. 45**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender**  
**Tahun 2024 Dengan Target Akhir Masa RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1. Indeks Pembangunan Gender	98,55**	96,67*	97,95%

Keterangan: - \* Realisasi merupakan realisasi tahun 2023  
 - \*\* Revisi Target RPJMD

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 belum dirilis dalam BPS tahun 2024 sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 yaitu sebesar 96,67% dari target IPG akhir RPJMD sebesar 98,55%, sehingga nampak bahwa indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 belum mencapai target akhir RPJMD, masih memerlukan angka sebesar 1,88 poin untuk mencapai target RPJMD tersebut.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Gender jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 mencapai 96,53% dan lebih rendah dari Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 92,63 pada tahun 2024. Untuk diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mencapai 92,24 dan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 ini masih menampilkan data tahun 2023 dalam BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sampai dengan Laporan Kinerja ini

disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 realisasinya yaitu sebesar 92,63, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 46**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender**  
**Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1. Indeks Pembangunan Gender	96,67*	92,63*

Keterangan: \* Realisasi merupakan realisasi tahun 2023 BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024 (diolah kembali)

**Sasaran Strategis 4**  
**Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 47**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5	2,38	52,88

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024 (diolah kembali)

**1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat

ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 48**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5	2,38	52,88

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024 (diolah kembali)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 2,38 sementara target yang ditetapkan pada RPJMD revisi sebesar 4,5% pada tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 52,88%, penurunan TPT Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 lebih rendah dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja atau RPJMD. Pengangguran terbuka didominasi oleh sektor industri, turunnya pergerakan industri dan perdagangan, namun demikian diharapkan mulai tahun depan secara perlahan tapi pasti tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan dengan terbangunnya smelter nikel di Kabupaten Morowali Utara akan mempengaruhi berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Selanjutnya perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa, jika dibandingkan TPT tahun 2024 dengan TPT tahun 2021 maka dapat dilihat bahwa TPT tahun 2021 sebesar 2,98 dan angka ini menurun pada tahun 2024 sebesar 2,38 atau menurun sekitar 0,6 poin, dan selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 2,25 dan angka ini meningkat pada tahun 2024 sebesar 2,38 atau meningkat sekitar 0,13 poin, selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,23 dan angka ini pada tahun 2024 sebesar 2,38 atau meningkat sekitar 0,15 poin, tinggi dan rendahnya TPT itu dikarenakan upaya yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program kegiatan dalam rangka menekan angka pengangguran

terbuka di tahun 2024 ini telah dan akan terus dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tabel di bawah dapat dilihat untuk tahun 2021 realisasi sebesar 2,98 dan untuk tahun 2022 sebesar 2,25% dan tahun 2023 sebesar 2,23 selanjutnya presentase TPT tahun 2024 sebesar 2,38%.

**Tabel. 49**  
**Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,98	2,25	2,23	2,38

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah 2,38 sementara target dalam RPJMD TPT yaitu sebesar 4,3% dengan demikain jumlah TPT di Kabupaten Morowali Utara jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ada di RPJMD, capaian yang diperoleh dari target RPJMD dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 55,34%. Adapun perbandingan target akhir RPJMD dengan realisasi TPT pada tahun 2024 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 50**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Tahun 2024 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,3	2,38	55,34

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024

Untuk tahun 2024 TPT Kabupaten Morowali Utara angkanya dibawah target TPT di tahun 2026 sebagai akhir masa RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah menyiapkan beberapa program prioritas dan upaya inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Selanjutnya perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

**Tabel. 51**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,38	3,15

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tengah pada februarai tahun 2024 berada pada presentase 3,15 ini berdasarkan berita resmi statistik No.29/05/72/Th. XXVII, 6 Mei 2024, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sebesar 2,38 yaitu lebih rendah sedikit dari TPT Provinsi Sulawesi Tengah.

**Sasaran Strategis 5**  
**Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 52**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1. Indeks Inovasi Daerah	35.00-60,00 (Inovativ)	39,99 (Inovativ)	114,25

Sumber: Surat Keputusan Mendagri No.400.10.11-4898 Tahun 2024

**1.1 Indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah**

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

**a. Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.**

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

**b. Inovasi Pelayanan Publik.**

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

**c. Inovasi Daerah lainnya.**

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4898 tahun 2024 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2024, maka atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 skor meningkat dengan **skor Indeks 55,22** predikat Inovatif dan untuk Kabupaten Morowali Utara skor indeks meningkat dengan **skor Indeks 39,99** predikat Inovatif yang sebelumnya pada tahun 2023 **skor indeks 35,18**. Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara meningkat namun masih di bawah Provinsi Sulawesi Tengah lain dengan tahun lalu pemerintah Kabupaten Morowali Utara berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun demikian masih perlu dioptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Adapun realisasi Indeks inovasi daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 53**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35.00-60,00 (Inovativ)	39,99 (Inovativ)	114,51

Sumber: Surat Keputusan Mendagri No.400.10.11-4898 Tahun 2024

Selanjutnya perbandingan perkembangan Indeks Inovasi Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 54**  
**Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 Indeks Inovasi Daerah	10,76 (kurang inovatif)	0 (Nol) Tidak dapat dinilai	35,18 (Inovatif)	39,99 (Inovatif)

Pada tabel diatas realisasi tahun 2021 sebesar 10,76 (kurang inovatif) dan realisasi tahun 2022 sebesar 0 (nol) tidak dapat dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6302 A tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2022, karena tidak melaporkan inovasi daerah pada tahun 2022, selanjutnya nilai realisasi tahun 2023 sebesar 35,18 (inovatif) dan meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021, selanjutnya nilai realisasi tahun 2024 sebesar 39,99 angka ini meningkat setiap tahunnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026, jika dibandingkan dengan target RPJMD, indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah 39,99 (Inovatif) belum mencapai target RPJMD yaitu 60,01-100 (sangat inovatif) dengan demikian capaian Inovasi Daerah adalah sebesar 66,63%. Adapun perbandingan target akhir RPJMD dengan realisasi Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 55**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Indeks Inovasi Daerah**  
**Tahun 2024 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1. Indeks Inovasi Daerah	60,01-100 (sangat inovatif)	39,99 (inovatif)	66,63

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

**Tabel. 56**  
**Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dengan**  
**Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 . Indeks Inovasi Daerah	39,99 (Inovatif)	55,22 (inovatif)

**Sasaran Strategis 6**  
**Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 57**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor"**  
**Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	10.45	23.04*	220,47%

Keterangan: \*) Realisasi tahun 2023,  
 Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2024

**1.1 Indikator PDRB Perkapita.**

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 memiliki besaran PDRB sebesar 26.433.708

juta rupiah. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 21.081.538 juta rupiah. Peningkatan juga terjadi pada PDRB riil tahun 2023 yang mencapai 14.972.781 juta rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12.169.351 juta rupiah.

Sementara PDRB perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk juga meningkat mencapai angka Rp. 209.710.000 pada tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara meningkat dari 2021 ke 2022. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 10,56% dan tahun 2022 sebesar 36,37%. Sedangkan, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 23,04%.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi penyusunan PDRB Kabupaten Morowali Utara, diikuti kategori Industri Pengolahan serta kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di urutan ketiga. Ketiga kategori unggulan yang disebutkan di awal ini yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Morowali Utara disamping sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi penyusunan PDRB Kabupaten Morowali Utara, diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta kategori konstruksi di urutan ketiga. Ketiga kategori unggulan yang disebutkan di awal ini yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Morowali Utara disamping sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedamotor.

**Gambar. 12**

**Perkembangan PDRB Morowali Utara**

Uraian	2021	2022 <sup>*)</sup>	2023 <sup>++)</sup>
PDRB ADHK (2010=100) (Juta Rp)	8.923.858	12.169.351	14.972.781
PDRB ADHB (Juta Rp)	13.087.885	21.081.538	28.433.708
PDRB perkapita ADHB (Juta Rp)	107,12	169,78	209,71
Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,56	36,44	23,04

Sumber: PDRB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Dari gambar diatas berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 bahwa Realisasi PDRB perkapita atau pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 23.04 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 10.45% dengan capaiannya yaitu sebesar 220,47%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 58**  
**Perbandingan Target**  
**Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja**  
**PDRB Perkapita Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	10.45	23.04*	220,47%

Selanjutnya realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) perkapita tahun 2024 berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 menggunakan angka sementara dan sangat sementara sehingga untuk realisasi tahun 2024 masih menggunakan angka realisasi tahun 2023. Perbandingan realisasi perkembangan PDRB Morowali Utara tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 59**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja**  
**PDRB Perkapita Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1. PDRB Perkapita	10,45	10,45	10.45*	23.04*

Keterangan: \*) Realisasi tahun 2022 dan 2023,  
 Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 menggunakan angka sementara dan sangat sementara sehingga untuk realisasi tahun 2021 s.d 2023 angka masih sama karena menggunakan angka tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 10.45 Juta dan untuk relisasi tahun 2024 angka meningkat sekitar 12,59 poin akan tetapi masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026 realisasi Produk

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) perkapita tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026 perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 60**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1. PDRB Perkapita	12.26	23.04	187,92%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Produk Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2024 adalah 23,04% jika dibandingkan dengan Target Akhir Masa RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 12.26% maka capaiannya sebesar 187,92% sudah melebihi target, dan diharapkan kedepannya dilakukan perbaikan target RPJMD karena tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan dalam lampiran draft revisi RPJMD tahun lalu.

Selanjutnya Perbandingan PDRB Perkapita dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

**Tabel. 61**  
**Perbandingan PDRB Perkapita dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng/Kabupaten Banggai
1.1 . PDRB Perkapita	23,04 *	2,40*

Keterangan: \*) Realisasi tahun 2023

Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2024

Perbandingan regional antar kabupaten di Sulawesi Tengah dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Pada tahun 2023 PDRB terendah adalah Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar Rp 3,01 Triliun, sedangkan tertinggi

adalah Kabupaten Morowali dengan PDRB sebesar Rp 158,04 Triliun atau sekitar 45,52 persen dari seluruh PDRB seProvinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2023, Kabupaten Morowali Utara menempati urutan ke-4 dalam hal besaran PDRB. Bila dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2023, Kabupaten Morowali Utara adalah kabupaten dengan pertumbuhan PDRB terbesar ke-1 di Sulawesi Tengah yaitu sebesar 23,04 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Banggai sebesar 2,40 persen.

**Sasaran Strategis 7**  
**Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata**  
**Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN).**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." adalah sebagai berikut:

**Tabel. 62**  
**Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	11.950.000.000.000	17.716.666.908.464	148,25

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Morowali Utara

**1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN).**

Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, persentase peningkatan investasi di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 ini dapat dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebesar Rp. 17.026,069,988,836 dan pertumbuhan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 873,568,564,391 sehingga total *Nilai Pertumbuhan*

*Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2024 sebesar Rp. 17,716,666,908,464 persentase peningkatan dari tahun lalu sebesar 15,12%. Capaian kinerja Pertumbuhan nilai Investasi dapat dijelaskan dalam tabel Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 63**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
***Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	11.950.000.000.000	17.716.666.908.464	148,25

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Morowali Utara

Pada tabel di atas dapat dilihat Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan dengan target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2024 sebesar 17.716.666.908.464 sementara target yang ditentukan sebesar 11.950.000.000.000 dengan capaian sebesar 148,25%, maka *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2021-2024. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA+PMDN) realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 17.716.666.908.464, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun lalu yaitu 2021-2023, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 4.383.000.000.000 persentase peningkatan sebesar 304,21%, realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 8.164.400.000.000 persentase peningkatan sebesar 116,99% dan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 15.389.131.726.229 persentase peningkatan sebesar 15,12%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai nilai Pertumbuhan Investasi (PMA+PMDN) terus mengalami peningkatan selama periode tersebut. Untuk lebih jelasnya perbandingannya dapat lihat pada tabel. 62 di bawah.

**Tabel. 64**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	4.383.000.000.000	8.164.400.000.000	15.389.131.726.229	17.716.666.908.464

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi* apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 13.300.000.000.000, sementara Realisasi kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 17.716.666.908.464 telah melebihi target akhir RPJMD sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 133,20%. perbandingannya dapat lihat pada tabel. 63 di bawah ini.

**Tabel. 65**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pertumbuhan Investasi**  
**(PMA + PMDN) Tahun 2024 dengan**  
**Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 20234	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	13.300.000.000.000	17.716.666.908.464	133,20%

Selanjutnya Perbandingan *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/Provinsi yaitu untuk Kabupten Morowali Utara pada tahun 2024 Realisasi kinerja sasaran sebesar 17.716.666.908.464, sementara Realisasi kinerja sasaran pada standar nasional/Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024

belum didapat data sampai disusunnya laporan kinerja ini. Perbandingannya dapat lihat pada tabel. 64 di bawah.

**Tabel. 66**  
**Perbandingan Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)**  
**Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	17.716.666.908.464	Belum diketahui

Dikarenakan data nilai pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah atau Nasional tahun 2024 belum diketahui maka belum dapat dipaparkan angka perbandingan realisasi nilai pertumbuhan investasi (PMA+PMDN) Kabupaten Morowali Utara dengan Provinsi/Nasional.

**Sasaran Strategis 8**  
**Meningkatnya Kemandirian Desa**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Kemandirian Desa" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 67**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Meningkatnya Kemandirian Desa" Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,7538 Maju	106,58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## **1.1 Indeks Desa Membangun**

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

- a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

- a. komponen Indeks Desa Membangun;
- b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Untuk perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja Indeks Desa Membangun tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan target rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status IDM Mandiri yaitu target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 0,7072 status IDM Desa Maju, sementara untuk realisasi kinerja Indeks Desa Membangun pada tahun 2024 yaitu rata-rata IDM Kabupaten/Kota sebesar 0,7538 dengan status IDM Desa Maju dan capaiannya sebesar 106,58 pada tahun 2024 berdasarkan rekomendasi IDM yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa, angka tersebut telah memenuhi target pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 68**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Indikator Indeks Desa Membangun Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,7538 Maju	106,58

Selain dari rata-rata IDM Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang pada tabel di atas, dijelaskan pula Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sesuai data terbaru dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terungkap bahwa pembangunan desa di Kabupaten Morowali Utara tercatat berkembang sangat pesat.

Pada tahun 2021 yang merupakan awal pemerintahan pasangan Delis-Djira, desa mandiri di Morut belum ada alias nol. Namun tiga tahun kemudian yakni tahun 2024 naik menjadi 33 desa mandiri.

Pada tahun yang sama (2021), desa sangat tertinggal di Morut terdapat 3 desa yakni Desa Lemowalia dan Desa Salubiro, Kecamatan Bungku Utara dan Desa Ululaa, Kecamatan Petasia Barat. Namun sejak tahun 2022, tidak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal.

Data perkembangan desa atau IDM Morut selengkapnya sebagai berikut:

- Desa Mandiri, tahun 2021 (nol desa), tahun 2024 (33 desa)
- Desa Maju, tahun 2021 sebanyak 4 desa, tahun 2024 naik menjadi 52 desa.
- Desa Berkembang, tahun 2021 sebanyak 78 desa, tahun 2024 turun drastis menjadi 37 desa.
- Desa Tertinggal, tahun 2021 sebanyak 37 desa, tahun 2024 menjadi nol.
- Desa Sangat Tertinggal, tahun 2021 sebanyak 3 desa, tahun 2024 menjadi nol.

Berdasarkan rincian di atas, jumlah desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal turun drastis, karena telah naik kelas ke desa maju dan desa mandiri.

1. Desa Mandiri tahun 2024 sebanyak 33 desa atau sebesar 27,04% dari total seluruh jumlah desa yaitu sebanyak 122 desa.

2. Desa Maju pada tahun 2024 sebanyak 52 desa atau 42,62% dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa.
3. Desa Berkembang pada tahun 2024 tinggal 37 desa atau 30,32% dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, pada tahun 2024 desa berkembang turun drastis dimana pada tahun 2023 lalu sebanyak 72 desa.
4. Desa Tertinggal dan desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 sudah tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel. 69**  
**Status Indeks Desa Membangun Tahun 2024**

Total Desa/%	Tahun 2024				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
122	33	52	37	0	0
%	27,04%	42,62	30,32%	0%	0%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kab. Morowali utara

Selanjutnya untuk perbandingan realisasi kinerja Indeks Desa Membangun tahun 2021 s.d 2024 yaitu; Realisasi kinerja Indeks Desa Membangun pada tahun 2021 dan tahun 2023 rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status berkembang, selanjutnya realisasi kinerja indeks desa membangun tahun 2024 sebesar 0,7538 yaitu rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status desa (Maju). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 70**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun**  
**Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 Indeks Desa Membangun	>0,5989 Berkembang	>0,5989 (Berkembang)	0,6958 (berkembang)	0,7538 (Maju)

Selanjutnya perbandingan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s/d 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Desa mandiri pada tahun 2021 berjumlah 0 desa atau (0%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 berjumlah 2 desa atau (1,63%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya desa mandiri pada tahun 2023 berjumlah 4 desa atau (3,27%), selanjutnya desa mandiri pada tahun 2024 berjumlah 33 desa atau (27,04%), .
2. Desa maju pada tahun 2021 sebanyak 4 desa atau (3,27%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 21 desa atau (17,21%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya desa maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau (36,06%), selanjutnya desa maju pada tahun 2024 sebanyak 52 desa atau (42,62) .
3. Desa berkembang pada tahun 2021 sebanyak 78 desa atau (63,93%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 72 desa atau (59,01%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya pada tahun 2023 desa berkembang sebanyak 72 desa atau (59,01%) jumlahnya masih sama dengan tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2024 desa berkembang sebanyak 37 desa atau (30,32%) pada tahun 2024 desa berkembang turun drastis karena naik status menjadi desa mandiri dan maju.
4. Desa tertinggal pada tahun 2021 sebanyak 37 desa atau ( 30,32 %) dari total desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 27 desa atau ( 22,13 %) dari total desa sebanyak 122 desa, selanjutnya pada tahun 2023 jumlah desa tertinggal sebanyak 2 desa atau (1,63%), selanjutnya pada tahun 2024 jumlah desa tertinggal sebanyak 0 desa atau (0%).
5. Desa sangat tertinggal tahun 2021 sebanyak 3 desa atau ( 2,45%) dari total desa sebanyak 122 desa dari total desa sebanyak 122 desa, sedangkan untuk desa sangat tertinggal pada tahun 2022 dan tahun 2024 sebanyak 0 desa atau (0%) dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel. 71**  
**Realisasi Indikator Kinerja Satatus**  
**Indeks Desa Membangun Tahun 2021 s.d 2024**

NO	Tahun	Jumlah Desa/%	Status IDM Tahun 2021 s.d 2024				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	2021	122	0	4	78	37	3

		%	0	3,27	63,93	30,32	2,45
2	2022	122	2	21	72	27	0
		%	1,63%	17,21%	59,01%	22,13%	0%
3	2023	122	4	44	37	2	0
		%	3,27%	36,06%	59,01%	1,63%	0%
4	2024	122	33	52	37	0	0
		%	27,04%	42,62%	30,32%	0%	0%

Sumber: Hasil penilaian Kemendesa dan Daerah tertinggal Tahun 2021-2024

Selanjutnya perbandingan target masa akhir RPJMD tahun 2026 Kabupaten Morowali Utara adalah seluruhnya rata-rata IDM Kabupaten/kota sebesar 0,8155 status desa Mandiri, sementara pada tahun 2024 rata-rata IDM Kabupaten/kota sebesar 0,7538 status Desa Maju capaiannya sebesar 85,32%. Pada tahun 2024 sebanyak 33 desa yang berstatus desa mandiri dari jumlah seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa capaiannya sebesar 27,04%. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus bekerja keras dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri yaitu sebanyak 89 desa yang akan diupayakan tuntas sampai akhir RPJMD. Untuk perbandingan rata-rata IDM kabupaten/kota pada tahun 2024 dengan rata-rata IDM kabupaten/kota dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 72**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun**  
**Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1. Indeks Desa Membangun	0,8155 (Mandiri)	0,7538 Maju	85,32

Selanjutnya Indikator Kinerja Indeks Desa Memabangun Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 73**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun**  
**Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Desa Membangun	0,7538 (Maju)	0,7281 (Maju)

Dari tabel diatas nampak bahwa data Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara jika dibandingkan dengan IDM Provinsi Sulawesi Tengah atau Nasional diketahui bahwa IDM Morowali Utara tahun 2024 sedikit lebih tinggi yaitu 0,7538 status Maju sementara realisasi Indeks Desa Membangun Provinsi/Nasional tahun 2024 sebesar 0,7281 status Maju.

**Sasaran Strategis 9**  
**Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan**

Capaian indikator sasaran "Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 74**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan" Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 . Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,28	79,99	98,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah

### 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua mata yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Realisasi capaian IKLH Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 75**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,28	79,99	98,41

Sumber data: Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik
- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 realisasi sebesar 79,99 dari target yang ditetapkan sebesar 81,28 sehingga capainnya mencapai 98,41 termasuk kategori “baik” (indeks antara 70 s.d 89,9). Capaian tersebut hampir mencapai target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2024.

Adapun perbandingan perkembangan capaian Indeks Infrastruktur pada beberapa tahun terakhir yaitu antara tahun 2021 dengan tahun 2024 nampak dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 76**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**IKLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 . Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,60	55,79	77,31	79,99

*Sumber data: Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut*

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 realisasi sebesar 50,60 pada tahun 2022 realisasi sebesar 55,79 meningkat sebesar 5,19 poin, selanjutnya realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 sebesar 77,31 meningkat sebesar 26,71 poin dari realisasi tahun 2021 dan sebesar 21,52 poin dari realisasi tahun 2022, selanjutnya perbandingan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 sebesar 79,99 meningkat sebesar 29,39 poin dari realisasi tahun 2021 dan sebesar 24,2 poin dari realisasi tahun 2022 serta meningkat sebesar 2,68 poin dari realisasi tahun 2023.

Capaian IKLH tahun 2024 jika dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan (target capaian IKLH) pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

**Tabel. 77**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas**  
**Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Target**  
**Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,72	79,99	97,88

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IKLH tahun 2024 sebesar 79,99 belum mendekati target tahun 2026 yaitu capaiannya mencapai 97,88%. Agar kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya untuk perbandingan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 78**  
**Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**  
**Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,99	75,57

Keterangan: Realisasi merupakan realisasi tahun 2024

Untuk perbandingan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di atas bahwa realisasi indeks kualitas lingkungan Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yaitu sebesar 79,99 kemudian Provinsi Sulawesi Tengah IKLH tahun 2024 yaitu sebesar 75,57.

**Sasaran Strategis 10**  
**Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 79**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**“Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah” Tahun 2024**

Indikator	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679	N/A	N/A

**1.1 Indeks Rasa Aman.**

Pada sasaran ini terdiri dari 1 indikator, yakni indeks rasa aman dimana pada tahun 2024 ini belum ada hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan DAMKAR, dan indikator ini merupakan indikator pemerintah daerah yang baru ditentukan diakhir tahun 2024 dimana telah dilakukan perbaikan IKU Pemerintah Daerah. Berikut realisasi dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 80**  
**Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Rasa Aman Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679	N/A	N/A

*Sumber data: Data dari Satpol PP dan Damkar Kab.Morut*

Dikarenakan data realisasi Indeks Rasa Aman belum dilakukan survei berdasarkan informasi dari Satuan Pamong Polisi dan DAMKAR, maka kami belum bisa memaparkan hasilnya, akan tetapi kami akan paparkan informasi terkait rasio jumlah anggota Linmas dalam satu desa, dan jumlah kasus gangguan Trantibum serta jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah sebagai berikut:

**Tabel. 81**  
**Jumlah Kasus Gangguan Trantibum serta Jumlah Kasus**  
**Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2024**

Dimensi	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap jumlah Desa	1:10	1:10	100
Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	42 kasus	67 Kasus	159,52%
Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani	120 kasus	157 kasus	130,83%

Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 anggota Linmas, tahun 2024 terdapat pengukuhan sebanyak 1.250 personil perbandingan satu anggota Linmas dalam satu desa di Kabupaten Morowali Utara yaitu 1:10. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 67 gangguan dan tertangani semua sehingga capaiannya 159,52% jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani yang ditemukan sebanyak 157 kasus sudah tertangani melalui yustisi/hukum, pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani tahun 2024 tercapai 130,83% yaitu Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 157 kasus seluruhnya tertangani.

**Tabel. 82**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman**  
**Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 Indeks Rasa Aman	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Rasa Aman pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 serta tahun 2024 belum bisa dipaparkan karena belum ada data yang memberikan gambaran tentang indeks rasa aman di Kabupaten Morowali Utara karena Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR daerah belum melaksanakan survei terkait dengan indeks rasa aman.

**Tabel. 83**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman**  
**Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1 . Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Rasa Aman tahun 2024 belum bisa dipaparkan karena tidak ada dari perangkat daerah penanggungjawab indikator.

**Sasaran Strategis 11**  
**Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 84**  
**Capaian Sasaran**  
**"Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 . Indeks Infrastuktur Daerah	0,522	1,262	241,76

**1.1 Indeks Infrastuktur Daerah.**

Diketahui bahwa Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastuktur Daerah dengan indikator Indeks Infrastuktur Daerah, pada tahun 2023 bahwa mengalami perubahan target dimana pada tahun 2022 terjadi salah menghitung target khususnya pada komposit Kualitas Penerangan jalan Umum (PJU) dimana bobotnya seharusnya 0,05 akan tetapi yang terhitung dan tertuang pada laporan kinerja tahun 2022 0,5% sehingga angka menunjukkan 25% seharusnya 2,5% dan pada Komposit edukasi proteksi kebakaran terdapat salah hitung dimana bobotnya 0,10 di kalikan dengan 30 jumlahnya 15 yang seharusnya jumlahnya 3%, sehingga realisasi indikator kinerja sasaran tersebut akan terlihat lebih besar dengan tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya untuk laporan kinerja tahun 2024 targetnya sebesar 0,522% dan realisasi sebesar 1,262% dengan capaian rata-rata sebesar 241,76%. Indeks Infrastuktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastuktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, pemenuhan bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, level of service (peningkatan jalan), kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan konstruksi, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time. Manfaat dari pengukuran indeks infrastuktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan

dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Keberhasilan ini diperoleh dari Perhitungan Indeks Infrastruktur Kabupaten Morowali Utara dengan mengagregasi dari capaian setiap komposit yang mendukungnya sesuai dengan bobot masing-masing, yang sekaligus juga merupakan indikator kinerja sasaran yaitu:

- 25 % dari persentase kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang)
- 15 % dari rata-rata persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik
- 0,05 % dari persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 10 % dari persentase pengurangan sampah
- 15 % dari persentase pengangkutan sampah
- 10 % dari persentase edukasi proteksi kebakaran
- 15 % dari persentase response time.

sebagai berikut:

**Tabel. 85**  
**Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Tahun 2024**

No	Komposit	Bobot	Target		Capaian	
			Persentase	Indeks	Persentase	Indeks
1	Persentase jalan dan Jembatan mantap	0,25	63,6	15,9	111,44	27,86
2	Persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	0,15	52	7,8	370,2	55,53
3	Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)	0,05	74	3,7	47,6	2,38
4	Persentase pengurangan sampah	0,10	60	6	120,8	12,08
5	pengangkutan sampah	0,15	0,52	7,8	2,53	0,38
6	Edukasi proteksi kebakaran	0,10	40	4	60	6
7		0,15	46,66	7	146,66	22

	Response time				
<b>Jumlah</b>				52,2	126,23
<b>Indeks Infrastruktur</b>		1,00		<b>0,522</b>	<b>1,262</b>

Sumber data: Data dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Dari tabel di atas nampak bahwa meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 yang diukur berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 1,262 dari target yang diharapkan sebesar 0,522. Rincian Indeks Infrastruktur Daerah tersebut sebagaimana data dalam tabel berikut :

**Tabel. 86**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,522	1,262	241,76

Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir nampak dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 87**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2021 s/d 2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 . Indeks Infrastruktur Daerah	)*	0,497	0,282	1,262

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2021 realisasinya tidak dapat dipaparkan karena pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator, selanjutnya pada tahun 2022 realisasinya sebesar 0,497 pada tahun ini terjadi salah hitung dalam menentukan target yaitu pada komposit kualitas Penerangan

Jalan Umum (PJU) dan komposit Edukasi Proteksi Kebakaran, sementara tahun 2023 realisasi Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 0,282. Untuk tahun 2023 perhitungan Indeks Infrastruktur sudah meliputi infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan, Infrastruktur Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Ketertiban dan Keamanan. Selanjutnya untuk realisasi Indeks Infrastruktur Tahun 2024 sebesar 1,262.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2026 (Target RPJMD) adalah sebagai berikut :

**Tabel. 88**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2024 Dengan Target RPJMD 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,596	1,262	211,74

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2024 sebesar 1,262 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 0,596% dengan capaian rata-rata sebesar 211,74%.

Selanjutnya Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Nasional/Provinsi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 89**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara**  
**Tahun 2024 Dengan Target Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/provinsi Sulawesi Tengah	
1.1. Indeks Infrastruktur Daerah	1,262	* )	

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Daerah Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah, untuk realisasi indeks infrastruktur Kabupaten Morowali Utara sebesar 1,262.

**Sasaran Strategis 12**  
**Meningkatnya Konektifitas Wilayah**

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Konektifitas Wilayah" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 90**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Meningkatnya Konektifitas Wilayah" Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,90	0,61*	67,77

*Keterangan: \* Data Realisasi Tahun 2023*

*Sumber data: Data dari Dinas Perhubungan Daerah Kab.Morut*

**1.1 Rasio Konektivitas Kabupaten.**

Indikator Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten realisasi kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 91**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja**  
**Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 . Rasio Konektifitas Kabupaten	0,90	0,61*	67,77

*Keterangan: \* Data Realisasi Tahun 2023*

*Sumber data: Data dari Dinas Perhubungan Daerah Kab.Morut*

Dari tabel tersebut data yang dituangkan masih dengan tahun lalu sehingga nampak bahwa realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas tahun 2024 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,90 sehingga capaiannya mencapai 67,77% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu:  $0.6 \times 0.8 + 0,33 \times 0,42 = 0,61$  dimana IK1 (Angkutan Jalan) =  $3 \times 0.8 / 4 = 0.6$  dan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) =  $3 \times 0,42 / 4 = 0.33$  (IK1 diperoleh dari penjumlahan jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Morowali Utara, bobot trayek, serta jumlah kebutuhan trayek dan (IK2 diperoleh dari jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten), jumlah bobot lintas serta jumlah kebutuhan lintas penyeberangan). Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2021 s.d 2023 menunjukkan angka yang sama tidak ada peningkatan, data tersebut diperoleh dari Perangkat Daerah Pengampu yaitu Dinas Perhubungan Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 92**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja**  
**Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 .Rasio Konektifitas Kabupaten	0,61	0,61	0,61	0,61

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2024 angkanya sama dengan tahun 2021 s.d 2023, realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Morowali Utara berdasarkan sumber data dari Dinas Perhubungan Daerah pada tahun 2024 sebesar 0,61.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja tahun 2026 (Target RPJMD) adalah sebagai berikut :

**Tabel. 93**  
**Realisasi Kinerja**  
**Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2024**  
**dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator kinerja Sasaran	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1 . Rasio Konektivitas Kabupaten	0,95	0,61	64,21

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2024 sebesar 0,61 masih jauh dari yang diharapkan pada target tahun 2026 (RPJMD) yaitu sebesar 0,95 dengan capaian rata-rata sebesar 64,21%. Agar kondisi Rasio Konektivitas Kabupaten yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional atau Provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel. 94**  
**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Rasio Konektivitas Kabupaten**  
**Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1. Rasio Konektivitas Kabupaten	0,61	*)	

Dikarenakan data Rasio Konektivitas Kabupaten Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 belum *release atau datanya tidak diperoleh*, maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah.

**Sasaran Strategis 13**  
**Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif**

Capaian indikator sasaran "Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" adalah sebagai berikut:

**Tabel. 95**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif"**  
**Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 . Indeks Reformasi birokrasi	>70-80/BB	60,13/B	75,16
1.2 . Predikat SAKIP	>70-80/BB	69,21/B	86,51
1.3 . Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
1.4 . Opini BPK	WTP	WTP*	100

Keterangan: \* Ralisasi menggunakan realisasi tahun 2023

### 1.1 Indeks Reformasi birokrasi

Bahwa Reformasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 (delapan) area perubahan dalam

reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada road map atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Morowali Utara perlu di lakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, pelaksanaan reformasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang profesional khususnya perangkat daerah yang langsung memberikan pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menilai komponen yaitu; RB General, RB Tematik dengan kesimpulan hasil evaluasi yang dicapai berupa capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 69,21 dengan kategori "B", untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

**Tabel. 96**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 . Indeks Reformasi Birokrasi	>70-80/BB	69,21/B	86,51

*Sumber data: Data dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2024*

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil evaluasi Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara mencapai predikat 69,21/B dari target yang ditetapkan yaitu BB (>70-80) dan capaiannya sebesar 86,51%.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 s.d 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 s.d 2023 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 97**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	41,72/C	49,81/CC	51,76/CC	69,21/B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, dimana realisasi indikator kinerja Indeks RB pada tahun 2024 sebesar 69,21/B sekitar 17,45 point untuk tahun 2023, dan untuk tahun 2021 sebesar 27,49 dan untuk tahun 2022 sebesar 19,4. Realisasi indikator kinerja Indeks RB pada tahun 2024 sebesar 69,21/B yaitu predikat "baik".

Selanjutnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

**Tabel. 98**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi**  
**Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	>80-90/A	69,21/B	76,9%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel. 99**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	69,21/B	77,31/BB	

Pada tabel diatas digambarkan bahwa jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi yaitu masih kategori 69,21/B sedangkan Pemerintah Provinsi kategori 77,31/BB. Kabupaten Morowali Utara predikat Reformasi Birokrasi masih satu tingkat di bawah provinsi Sulawesi Tengah.

### 1.2 Indikator Predikat SAKIP

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan nilai 60,13 dengan predikat **B**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**" yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan sebagian pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja sebagaimana yang direkomendasikan oleh MENPANRB.

Perbandingan target kinerja Sasaran dengan realisasi Indikator kinerja sasaran predikat Sakip Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 100**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Predikat SAKIP Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Predikat SAKIP	>70-80/BB	60.13/B	75,16

*Sumber data: Data dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2024*

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil evaluasi Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara mencapai predikat 60,13/B dari target yang ditetapkan yaitu BB (>70-80) dan capaiannya sebesar 75,16%.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2022-2023 dilakukan dengan cara Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 101**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja**  
**Predikat SAKIP Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.2 . Predikat SAKIP	45,28/C	50,31/CC	53,35/CC	60,13/B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara mengalami

peningkatan. Pada tahun 2024 predikat SAKIP 60,13/B mengalami peningkatan sekitar 14,85 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021, selanjutnya predikat SAKIP tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,82 poin, selanjutnya predikat SAKIP tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,78 poin.

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP tahun 2024 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

**Tabel. 102**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP**  
**Tahun 2024 dengan Target Akhir Masa RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.2 . Predikat SAKIP	>80-90/A	60,13/B	66,81

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Predikat SAKIP tahun 2024 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya Capaian Predikat SAKIP tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel. 103**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2024**  
**dengan Standar Nasional/Provinsi**

Indikator	Realisasi Tahun 2024		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.2 Predikat SAKIP	60,13/B	BB	

Pada tabel diatas digambarkan bahwa jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi yaitu masih kategori 60,13/B sedangkan Pemerintah Provinsi kategori BB. Kabupaten Morowali Utara Predikat SAKIP masih satu tingkat di bawah provinsi Sulawesi Tengah.

### 1.3 Indikator Nilai LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Target Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai Kinerja EKPPD Kabupaten Morowali Utara dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel. 104**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Nilai LPPD Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A

*Sumber data: Data dari Bagian Pemerintahan Kab. Morowali Utara*

Pada tabel diatas bahwa hasil Nilai LPPD tahun 2024 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2024 pada awal tahun 2025.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021-2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021 dan 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 105**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja**  
**Nilai LPPD Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.3 Nilai LPPD	N/A	2.78 (sedang)	N/A	N/A

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2024 baru disusun pada awal tahun 2025 maka belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa dibandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2021 dan 2023 dengan tahun 2024. Untuk tahun 2022 nilai LPPD telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023, nilai tahun 2022 dikeluarkan Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022, sementara nilai LPPD tahun 2024 sampai saat disusunnya LAKIP TA. 2024 diawal tahun 2025 belum ada nilai LPPD yang dirilis dari Kemendagri.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

**Tabel. 106**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024**  
**Dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2024 baru disusun pada awal tahun 2025 maka belum dapat dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa membandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2023 dengan target akhir RPJMD periode 2021-2026.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel. 107**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun**

Indikator	Realisasi Tahun 2024		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.3 Nilai LPPD	N/A	N/A	

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2024 baru disusun pada awal tahun 2025 maka belum dapat dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa membandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi tahun 2024.

#### **1.4. Indikator Opini BPK**

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK tahun 2024 untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa hasil Opini BPK tahun 2024 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses pemeriksaan keuangan oleh karenanya pada LAKIP Tahun Anggaran 2024 data yang dituangkan adalah data tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 108**  
**Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**  
**Opini BPK Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	100

*Keterangan : \*) Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023*

*Sumber data: Data dari BPKAD Kab.Moowali Utara*

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Kabupaten Morowali Utara dalam 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022-2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 109**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja**  
**Opini BPK Tahun 2021-2024**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.4 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP*

*Keterangan: \* Realisasi Opini BPK Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator Opini BPK pada tahun 2021 dan 2023 yaitu predikat WTP, sementara realisasi kinerja indikator Opini BPK tahun 2024 belum dirilis oleh BPK masih dalam pemeriksaan keuangan maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan realisasi tahun 2024, akan tetapi masih menuangkan data tahun 2023 yaitu opini BPK dengan predikat WTP pula.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

**Tabel. 110**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2024 dengan**  
**Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026**

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	*)

Keterangan : \* Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa data Opini BPK pada tahun 2024 sampai saat ini belum dirilis oleh BPK maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2024 dengan target akhir RPJMD periode 2021-2026.

Selanjutnya Perkembangan realisasi Opini BPK tahun 2024 untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa hasil Opini BPK tahun 2024 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses pemeriksaan keuangan, maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2024 dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

**Tabel. 111**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2024 dengan**  
**Standar Nasional/Provinsi Tahun 2024**

Indikator	Realisasi Tahun 2024		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.4 Opini BPK	WTP*	WTP*	

Keterangan : \* Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

- pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIMDA menjadi terintegrasi dengan SIPD.
- penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah.
- penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :
  - Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
  - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
  - Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat;
  - Optimalisasi tatakelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan.

### **3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

- **Sasaran 1 Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat** dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2024 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarnya sebesar **100,40%**, dengan predikat Sangat Baik. Pada tahun 2024 AHH sudah melebihi target, ini disebabkan karena upaya pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi permasalahan utamanya sesuai visi dan misi Pemerintah kabupaten Morowali Utara yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA". Usia Harapat Hidup atau UHH di Morowali Utara cukup tinggi yaitu mencapai 72,19. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, terkait dari pihak individu atau keluarga yaitu kemungkinan faktor tingkat pengetahuan, ekonomi, budaya, perilaku dan kesadaran kesehatan serta nutrisi yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari penanganan *stunting secara cross cutting (rembuk bersama)* antara beberapa Perangkat Daerah terkait, dan persentase kematian ibu saat melahirkan sudah dapat diturunkan. Faktor kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, sarana pelayanan yang cukup memadai, serta akses menuju tempat kesehatan sudah dapat diakses dengan mudah, sehingga identifikasi faktor risiko kegawatdaruratan atau penyakit, deteksi awal pencegahan komplikasi penyakit, dan pertolongan berjalan secara optimal. Termasuk didalamnya peningkatan sarana prasarana RSUD Kolonodale dan jumlah ketersediaan Puskesmas Pembantu. Pencegahan, pengendalian serta penanganan Triple Burden Diseases sudah mendapat perhatian serius, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang harusnya bisa dicegah, misalnya dengan imunisasi. Permasalahan-permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah seperti gaya hidup masyarakat perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya usia lanjut yang menderita, tetapi ada kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain lain juga dialami pada masyarakat dewasa bahkan usia muda. Kasus pandemi yang terjadi pada tahun lalu juga menjadi permasalahan yaitu dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, sehingga ke depannya perlu persiapan dari pemerintah setempat untuk

meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabah yang tiba-tiba muncul dan berdampak luas.

- **Sasaran 2 Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar** dengan 2 indikator sasaran yaitu: indikator Harapan Lama Sekolah realisasinya sebesar 12,44 nilai ini hampir mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Revisi yaitu sebesar 12,60 sehingga capaiannya sebesar 98,73%, selanjutnya Indikator Rata-Rata Lama Sekolah realisasinya sebesar 9,13 nilai ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Revisi yaitu sebesar 9,10 sehingga capaiannya sebesar 100,32. Pada tahun 2024 bahwa sasaran **Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar** dengan kedua indikator tersebut capaian rata-rata sasarnya sebesar **99,52%**, dengan predikat sangat baik. Kualitas pendidikan masih merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi pendidikan di Kabupaten Morowali Utara khususnya pendidikan inklusif masih belum merata. Fakta dan permasalahan kualitas Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang ditandai dengan:
  - a. Angka melek huruf rendah, khususnya masyarakat di daerah-daerah terpencil (daerah tertinggal), dan khususnya KAT.
  - b. Angka putus sekolah masih tinggi.
  - c. Bantuan beasiswa Pemerintah dan CSR untukantisipasi angka putus sekolah sangat diperlukan.
  - d. Pembelajaran kebencanaan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran sehingga diperlukan kurikulum lokal.
2. Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai yang ditunjukkan dengan:
  - a. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai.
  - b. Pemeliharaan gedung sekolah yang belum memadai.
  - c. Teknologi pembelajaran masih lemah dan belum mendukung model/sistem belajar berbasis daring.
3. Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai dikarenakan:
  - a. Pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal.
  - b. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga honorer yang belum ada.
  - c. Tingkat kesejahteraan guru belum maksimal.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara cenderung masih rendah atau tertinggal. Pertama,

berkaitan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan yang berujung pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya gedung sekolah yang tidak layak huni, tidak tersedia media belajar yang baik, serta tidak tersedia perpustakaan bagi siswa. Selain itu, di Kabupaten Morowali Utara, setiap wilayah belum tentu memiliki buku pelajaran dan referensi yang sama, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang buku-bukunya tidak lengkap. Belum lagi ada sekolah-sekolah yang fasilitas laboratorium komputer dan kelasnya masih belum memadai. Kedua, belum meratanya tenaga guru dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah. Seringkali jumlah tenaga pengajar tetap tidak memadai, sehingga sangat dibutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut. Terjadinya pemusatan guru di daerah perkotaan menyebabkan tidak terlayannya daerah yang lebih terpencil di Kabupaten Morowali Utara. Disamping itu, mutu dan kualitas pembelajaran juga sangat kurang karena banyak guru yang mengajar tidak pada kompetensinya. Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru yang mengajar di Kabupaten Morowali Utara berpengaruh terhadap rendahnya pemerataan kualitas Pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Masalah kesejahteraan dan biaya hidup yang tinggi merupakan salah satu penyebab banyak guru yang tidak mau mengajar atau ditempatkan di daerah non perkotaan dimana kesempatan untuk mencari penghasilan sampingan lebih kecil. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau budaya pendidikan masih rendah. Faktor sosial yang berkaitan dengan kultur masyarakat, baik yang berupa pandangan, adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang melekat di dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali menjadi faktor penghambat bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak para orang tua siswa yang lebih memilih untuk memperkerjakan anak-anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan tentu sangat membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi usia anak-anak yang tidak lagi berada pada usia sekolah juga menjadi penghambat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Upaya atau Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Morowali Utara sejak periode 2021 hingga 2026 yaitu meningkatkan akses pelayanan Pendidikan dasar dan menengah, Percepatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta

Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah.

Adapun arah kebijakan yang direncanakan antara lain:

- Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan dasar dan menengah pendukung pembelajaran yang memadai.
- Peningkatan perluasan dan akses Pendidikan dasar dan menengah
- Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
- Mengembangkan Desa Cerdas.
- Meningkatkan cakupan jaminan asuransi pendidikan masyarakat (Kartu Indonesia Pintar).
- Mengembangkan beasiswa bagi pelajar dari rumah tangga miskin.
- Mengantisipasi penyediaan dukungan akses data bagi proses belajar daring (*online*).
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik.
- Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga pengajar.
- Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan.
- Memperkuat manajemen sekolah.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.
- Meningkatkan pemberian penghargaan bagi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi.
- Meningkatkan kapasitas antisipatif sekolah dalam penyelenggaraan sistem belajar daring

- **Sasaran 3 Meningkatnya Partisipasi Perempuan.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Partisipasi Perempuan** dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 2024 bahwa indikator sasaran tersebut masih menampilkan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 96,67 berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 karena sampai disusunnya LAKIP tahun anggaran 2024 belum dikeluarkan nilai indeks Pembangunan Gender untuk tahun 2024. capaian rata-rata sasarnya sebesar 98,34% dengan predikat sangat baik. Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara belum didukung oleh kelembagaan pengarusutamaan gender yang efektif. Pemahaman terhadap pentingnya pengarusutamaan gender belum menjadi keberpihakan para pengambil kebijakan. Selain itu, permasalahan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara antara lain lemahnya kapasitas jaringan pemberdayaan perempuan dan adalah pengembangan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan belum terfasilitasi. Hal ini ditunjukkan dengan Rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah dan DPRD kabupaten, belum tersedianya data potensi kelembagaan perempuan dan anak, belum kuatnya jaringan kerja sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dan belum adanya sistem

informasi gender dan anak. Upaya atau Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender adalah Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas Lembaga/kelompok masyarakat serta gender dan Pengarusutamaan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun kebijakan yang dilakukan yaitu ;

- Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan.
- Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gender.
- Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan pembangunan.
- Memperkuat organisasi perempuan.

Selanjutnya upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, upaya ini dilakukan sebagai wadah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

- **Sasaran 4 Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja** dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pada tahun 2024 kabupaten Morowali Utara dapat menurunkan TPT sebesar 2,38% akan tetapi lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 4,5% sehingga capaian rata-ratanya sebesar 52,88%, dengan predikat rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Permasalahan pengangguran di Kabupaten Morowali Utara merupakan dampak dari rendahnya penyerapan tenaga kerja. Dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh belum seimbang nya permintaan dan penawaran tenaga kerja dan rendahnya kompetensi calon tenaga kerja. Adanya *miss-match* tersebut terjadi karena tidak cocoknya persediaan/penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dilakukan melalui membangun kompetensi tenaga kerja yang unggul, baik melalui jalur lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Jalur lembaga pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia

unggul sebelum menjadi angkatan kerja, sedangkan jalur lembaga pelatihan merupakan lembaga yang mempersiapkan sumber daya manusia unggul bagi angkatan kerja baik yang belum bekerja maupun yang sedang bekerja. Pendidikan vokasi formal (SMK) yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyiapan tenaga kerja terdidik dan terlatih hingga saat ini belum mampu menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja. Begitu pula dengan keberadaan lembaga pelatihan vokasi informal (BLK) yang masih belum memadai sehingga menyebabkan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Seirama dengan semakin dikembangkannya industri berteknologi tinggi saat ini, maka standar kompetensi kerja juga harus semakin tinggi menyesuaikan dengan tuntutan industri berteknologi tinggi. Hingga saat ini, jalinan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (dunia usaha–dunia industri) masih belum optimal yang diduga berkorelasi dengan rendahnya rasio kesempatan kerja dan rendahnya pencari kerja yang ditempatkan. Rendahnya penyerapan tenaga kerja mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja daerah. Ditambah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap relasi pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, yang kemudian berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap pekerja. Strategi yang dilakukan untuk Meningkatkan inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja adalah Revitalisasi Balai Latihan Kerja, Pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja. Adapun arah kebijakan yang dilakukan yaitu; Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja. Pada tahun 2024 upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melakukan kolaborasi dengan pihak perusahaan-perusahaan tambang nikel yang melakukan investasi di kabupaten Morowali Utara baik perusahaan yang memiliki smelter atau pabrik nikel maupun yang tidak memiliki smelter dalam merekrut tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka di kabupaten Morowali Utara.

- **Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah** dengan indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan Pelayanan Publik;

- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

**a. Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.**

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

**b. Inovasi Pelayanan Publik.**

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa

publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

**c. Inovasi Daerah lainnya.**

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ditetapkan sebagai **Inovatif**, dengan capaian kinerja berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 400.10.11-4898 tahun 2024 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2024, maka atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 skor meningkat dengan **skor Indeks 55,22** predikat **Inovatif** dan untuk Kabupaten Morowali Utara **skor Indeks** sebesar **39,99** predikat **Inovatif** angka ini hampir mencapai target plus artinya sudah mencapai target inovatif tapi belum maksimal nilai target yaitu **35.00-60,00** poin (kategori Inovativ) sehingga capaian rata-ratanya sebesar **66,65%**. Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara meningkat namun masih di bawah Provinsi Sulawesi Tengah lain dengan tahun lalu pemerintah Kabupaten Morowali Utara berada di atas Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun demikian masih perlu dioptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi Sulawesi Tengah karena pada tahun 2024 telah melaporkan banyak Inovasi Daerah ke Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024, dengan hasil tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara semakin mengoptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Revitalisasi pusat-pusat

penelitian dan inovasi serta kebijakan yaitu menyelenggarakan festival teknologi tepat guna.

- **Sasaran 6 Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah** dengan indikator sasaran PDRB Perkapita, Pada tahun 2024 realisasi indikator sebesar 23,04 nilai ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan target 10,45 sehingga capaian rata-rata sasarnya sebesar 220,47%, dengan predikat sangat baik. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka pada tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 yang memiliki besaran PDRB sebesar 26.433.708 juta rupiah. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 21.081.538 juta rupiah. Peningkatan juga terjadi pada PDRB riil tahun 2023 yang mencapai 14.972.781 juta rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12.169.351 juta rupiah.

Sementara PDRB perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk juga meningkat mencapai angka Rp. 209.710.000 pada tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara meningkat dari 2021 ke 2022. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 10,56% dan tahun 2022 sebesar 36,37%. Sedangkan, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 23,04%.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi penyusunan PDRB Kabupaten Morowali Utara, diikuti kategori Industri Pengolahan serta kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di urutan ketiga. Ketiga kategori unggulan yang disebutkan di awal ini yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Morowali Utara disamping sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi penyusunan PDRB Kabupaten Morowali Utara, diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta kategori konstruksi di urutan ketiga. Ketiga kategori unggulan yang disebutkan di awal ini yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Morowali Utara disamping sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedamotor.

Strategi yang dilakukan adalah Revitalisasi Pertanian dan penguatan rantai nilai industri serta Optimalisasi Jasa Perdagangan dan Pariwisata. Dengan arah Kebijakan Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan dan Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan serta mengembangkan kerjasama usaha kelompok tani dan pelaku usaha dan Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertanian serta Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertambangan dan mengembangkan Desa Wisata serta memperluas kerjasama perdagangan antar daerah.

- **Sasaran 7 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN).**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi Daerah (PMDN dan PMA) dengan indikator sasaran Realisasi PMDN dan PMA. Pada tahun 2024 bahwa realisasi indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 17.716.666.908.464 dan nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Revisi yaitu sebesar Rp. 11.950.000.000.000 sehingga capaian rata-rata sasarnya sebesar 148,25%, dengan predikat sangat baik. Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang berkenaan dengan urusan penanaman modal yaitu rendahnya realisasi nilai investasi di bidang agribisnis dan pariwisata, belum memadainya daya dukung jalan, pasokan energi dan faktor-faktor non teknis lainnya antara lain isu keamanan, dan perizinan, serta belum optimalnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

Gambaran perkembangan nilai investasi PMDN/PMA di Kabupaten Morowali Utara cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu untuk PMA sebesar Rp. 17.026.069.988.836 Triliun dan PMDN terealisasi sebesar Rp. 690.596.919.628 Triliun ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi mayoritas merupakan investasi oleh investor asing. Seperti diketahui Kabupaten Morowali Utara memiliki kekayaan alam menjadi daya tarik pada investor asing untuk menanamkan modalnya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah pengembangan investasi daerah, dan arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan sistem pelayanan terpadu dalam penanaman modal (*Online Single Submission*), mengembangkan promosi dan kerjasama investasi.

- **Sasaran 8 Meningkatnya Kemandirian Desa.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Kemandirian Desa** dengan indikator sasaran Indeks Desa Membangun, pada tahun 2024 bahwa indikator sasaran realisasinya sebesar 0,7538 (Desa Maju) dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,7072 (Desa Maju) sehingga capaian rata-rata sasarnya sebesar 106,58%, dengan predikat Sangat Baik. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

- a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

- a. komponen Indeks Desa Membangun;
- b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

### **Capain Kinerja:**

Dijelaskan bahwa status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 sesuai data terbaru dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terungkap bahwa pembangunan desa di Kabupaten Morowali Utara tercatat berkembang sangat pesat.

Pada tahun 2021 yang merupakan awal pemerintahan pasangan Delis-Djira, desa mandiri di Morut belum ada alias nol. Namun tiga tahun kemudian yakni tahun 2024 naik menjadi 33 desa mandiri.

Pada tahun yang sama (2021), desa sangat tertinggal di Morut terdapat 3 desa yakni Desa Lemowalia dan Desa Salubiro, Kecamatan Bungku Utara dan Desa Ululaa, Kecamatan Petasia Barat. Namun sejak tahun 2022, tidak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal.

Data perkembangan desa atau IDM Morut selengkapnya sebagai berikut:

- Desa Mandiri, tahun 2021 (nol desa), tahun 2024 (33 desa)
- Desa Maju, tahun 2021 sebanyak 4 desa, tahun 2024 naik menjadi 52 desa.
- Desa Berkembang, tahun 2021 sebanyak 78 desa, tahun 2024 turun drastis menjadi 37 desa.
- Desa Tertinggal, tahun 2021 sebanyak 37 desa, tahun 2024 menjadi nol.
- Desa Sangat Tertinggal, tahun 2021 sebanyak 3 desa, tahun 2024 menjadi nol.

Berdasarkan rincian di atas, jumlah desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal turun drastis, karena telah naik kelas ke desa maju dan desa mandiri.

1. Desa Mandiri tahun 2024 sebanyak 33 desa atau sebesar 27,04% dari total seluruh jumlah desa yaitu sebanyak 122 desa.
2. Desa Maju pada tahun 2024 sebanyak 52 desa atau 42,62% dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa.
3. Desa Berkembang pada tahun 2024 tinggal 37 desa atau 30,32% dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, pada tahun 2023 lalu sebanyak 72 desa.
1. Desa Tertinggal dan desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 sudah tidak ada.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Percepatan pengurangan kemiskinan, meningkatkan peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa dan optimalisasi jasa perdagangan dan pariwisata dan arah kebijakan yaitu meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin, mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha, mengembangkan kapasitas usaha BUMDesa, peningkatan kemitraan strategis antara BUMDes dengan pelaku usaha, Peningkatan kapasitas kelembagaan, Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa, Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan, mengembangkan desa wisata.

- **Sasaran 9 Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan** dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada tahun 2024 bahwa indikator sasaran realisasinya sebesar 79,99% nilai ini masih lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam dokumen RJMD revisi yaitu sebesar 81,28 sehingga capaian

rata-rata sarasannya sebesar 98,41%, dengan predikat sangat baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik
- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari skala indeks tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 termasuk kategori "baik" (indeks antara 70 s.d 89,9) akan tetapi capaian tersebut belum mencapai target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2024.

Permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup adalah terjadinya penurunannya kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi ikan maupun penambangan liar. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan sehingga masyarakat juga terus melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan konsekuensinya. Hal ini berujung pada tingginya kerusakan lahan yang berujung pada meningkatnya resiko bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Sedangkan, belum optimalnya penanganan dan pengendalian bencana banjir, longsor, dan kekeringan juga merupakan permasalahan yang mendasar.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta Penegakan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan arah kebijakan adalah;

- Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.
- Mempertahankan daya dukung lahan.
- Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis.

- Meningkatkan pencegahan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup.
- Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan.

- **Sasaran 10 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan** dengan indikator sasaran Indeks Rasa Aman, pada tahun 2024 bahwa indikator sasaran tersebut belum ada capaian rata-rata sasarnya karena belum dilakukan survei Indeks Rasa Aman oleh dinas penanggungjawab yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Daerah. Strategi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu Meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil dengan arah kebijakan Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban lingkungan, percepatan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban, peningkatan jaminan kemanan dan ketertiban lingkungan.

Untuk diketahui bahwa dimensi yang menunjang Indeks Rasa Aman adalah Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 anggota Satlinmas, pada tahun 2023 terdapat Pengukuhan sebanyak 1.250 personil perbandingan satu anggota Linmas dalam satu desa di Kabupaten Morowali Utara yaitu 1:10. Selanjutnya Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 67 kasus gangguan dan tertangani semua sehingga capaiannya 100%, jumlah kasus pelanggaran sudah tertangani melalui yustisi/hukum. Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani tahun 2024 sebanyak 157 Kasus pelanggaran seluruhnya tertangani.

- **Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.**

Diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah** dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur Daerah, pada tahun 2024 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarnya sebesar 241,76%, dengan predikat Sangat Baik. Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalam, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana

infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, di sisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat di perlukan. Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan kesehariannya. Infrastruktur juga dapat disimpulkan sebagai segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkungannya yang meliputi sektor dan aspek sosial-ekonomi. Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, pemenuhan bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, level of service(peningkatan jalaan), kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan konstruksi, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time. Strategi serta upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 untuk meningkatkan indeks Infrastruktur Daerah kabupaten Morowali Utara antara lain;

- a. jalan dan jembatan
- b. saluran irigasi dan drainase
- c. Kualitas PJU
- d. pengurangan sampah
- e. pengangkutan sampah
- f. edukasi proteksi kebakaran
- g. response time

• **Sasaran 12 Meningkatnya Konektivitas Wilayah**

Diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Konektivitas Wilayah**, dengan indikator sasaran Rasio Konektivitas Kabupten, Realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2024 sebesar 0,61 dari target

yang ditetapkan sebesar 0,75 sehingga capaian rata-rata sasarannya mencapai 81,33%, dengan predikat tinggi akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas masih menampilkan data tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,85 sehingga capaiannya mencapai 71,76% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu:  $0.6 \times 0.8 + 0,33 \times 0,42 = 0,61$  dimana IK1 (Angkutan Jalan) =  $3 \times 0.8 / 4 = 0.6$  dan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) =  $3 \times 0,42 / 4 = 0.33$  (IK1 diperoleh dari penjumlahan jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Morowali Utara, bobot trayek, serta jumlah kebutuhan trayek dan (IK2 diperoleh dari jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten), jumlah bobot lintas serta jumlah kebutuhan lintas penyeberangan). Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.. Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/ kota lainnya adalah dengan Pengembangan sistem transportasi terpadu. Dan arah kebijakan yang dilakukan antara lain;

- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut.
- Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Jalan dan jembatan.
- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamagaan.
- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prsarana Kebinamagaan

- **Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan.**

Diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan** dengan 4 indikator sasaran Yaitu Predikat SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai LPPD dan Opini BPK capaian rata-rata sasarannya sebesar 77,12%, dengan predikat tinggi. Keberhasilan yang diperoleh dari masing-masing indikator telah dipaparkan diatas, Keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alaternatif solusi yang

telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara misalnya pada peningkatan predikat SAKIP dan indeks RB pada tahun 2024 berdasarkan hasil dievaluasi Tahun Anggaran 2024 nilainya untuk predikat SAKIP sebesar 60,13/B dan nilai untuk RB sebesar 51,76/CC, selanjutnya untuk nilai LPPD belum dirilis sampai disusunnya laporan LPPD Tahun Anggaran 2024 sementara untuk opini BPK masih menggunakan realisasi tahun 2023 yaitu Peredikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Tindak lanjut terhadap perbaikan nilai SAKIP dan RB, LPPD bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui langkah-langkah yaitu mereviu dan memperbaiki dokumen perencanaan baik tujuan dan sasaran, IKU yang digunakan serta ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka menengah, memperbaiki dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2024 ditingkat satuan kerja dari level eselon II, eselon III, eselon IV/JF serta staf atau pelaksana secara berjenjang, dan melakukan reviu terhadap program, kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU dan menyusun rencana aksi sebagai rincian perjanjian kinerja dengan menentukan target kinerja secara priodik/triwulan, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- a. Nilai merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara belum membangun akuntabilitas kinerja dengan OPD dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
- c. Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara adalah cukup memuaskan, namun ada beberapa hal atau solusi yang diperlukan guna perbaikan kedepan yaitu:
  - Pada aspek perencanaan: dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relepan dan terukur, rencana kerja tahunan OPD masih sebatas formalitas tidak dijadikan dasar pengajuan anggaran periode berikutnya. Hal tersebut mengurangi esensi keterkaitan antara anggaran yang diajukan dengan kinerja yang direncanakan.
  - Pada aspek pengukuran kinerja: IKU yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis belum menggambarkan hasil, dan belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis khususnya ditingkat OPD.
  - Pada aspek pelaporan kinerja: Laporan kinerja OPD belum sepenuhnya menggambarkan perbandingan kinerja yang memadai dan belum dapat

menyajikan atau mengaitkan secara langsung informasi atau realisasi keuangan dengan sasaran atau outcome yang akan diwujudkan.

- Pada aspek evaluasi kinerja: perlu diperhatikan bagi pihak APIP untuk lebih memahami terhadap sistem AKIP, sehingga mampu menggunakan instrument secara maksimal dan menerapkan professional judgment secara tepat.

Pada aspek capaian kinerja: yang perlu diperhatikan adalah capaian indikator outcome yang mempersentasikan sasaran dan kemajuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berupaya melakukan perbaikan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan Kementerian PAN RB pada tahun sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Telah Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
2. Telah ada upaya perbaikan terhadap komponen hasil
3. Telah ada upaya pengelolaan Sistem SPBE
4. Telah melakukan penyederhanaan birokrasi
5. Telah melakukan penyetaraan jabatan
6. Telah menyusun proses bisnis dan sop di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga berupaya meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi, namun terdapat hal-hal yang masih diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya:

1. Implementasi program reformasi birokrasi masih fokus ditingkat Pemerintah Daerah, sedangkan di tingkat Peragkat Daerah belum sepenuhnya merata dan berjalan optimal. Selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.
2. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi namun belum menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal.
3. Telah menunjuk agen perubahan sebagai pelopor perubahan, namun agen perubahan tersebut memiliki agenda kerja yang mampu mendorong peningkatan budaya kerja dan perubahan pada organisasi.
4. Telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap terhadap sebagian kebijakan namun belum sepenuhnya melakukan harmonisasi dan revisi terhadap kebijakaan-kebijakan yang menghambat.

5. Penyederhanaan birokrasi telah dilakukan dengan menetapkan SOTK baru, namun penyesuaian proses bisnis dan SOP untuk mendukung alur kerja belum selesai dilaksanakan secara menyeluruh pada Perangkat Daerah serta belum dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan proses bisnis dan SOP.
6. Masih perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen SDM mulai dari analisis beban kerja, identifikasi pengembangan pegawai, penyusunan standar kompetensi jabatan dan pemanfaatan sistem kepegawaian organisasi untuk memberikan kemudahan akses data kepegawaian.
7. Penerapan manajemen kinerja pada tata kelola akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.
8. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, WBS, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan SPIP sudah dibentuk, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
9. Belum dilakukan penetapan dan pembangunan zona integritas secara menyeluruh.
10. Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi SOP pelayanan belum dilakukan secara berkala sehingga belum dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, maka perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sampai ke level Perangkat Daerah.
2. Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Memaksimalkan peran Agen Perubahan dengan memiliki rencana aksi selaras dan tepat mengacu pada isu masalah unit kerja maupun organisasi, dan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih baik, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas keberhasilan Agen Perubahan.
4. Membangun budaya kerja pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah dengan menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak.
5. Optimalisasi area deregulasi kebijakan.
6. Menyusun peta proses bisnis dan SOP.
7. Optimalisasi implementasi SPBE.
8. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh.
9. Meningkatkan Implementasi SAKIP.
10. Membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi.
11. Memanfaatkan zona integritas.

12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penanganan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik.
13. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan.

Untuk indikator nilai LPPD tersebut belum di ketahui nilainya karena belum dirilis hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri dan untuk indikator nilai Opini BPK belum dirilis karena masih dalam proses audit sehingga pada tahun 2024 belum keluar hasil opini BPK sampai disusunnya LAKIP Tahun Anggaran 2024, sementara realisasi yang dituangkan adalah realisasi tahun lalu yaitu tahun 2023 dengan predikat WTP. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah dan mengefektifkan peran APIP. Pengawasan ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, utamanya penyelesaian atas rekomendasi BPK.

### 3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Daerah, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per-Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel 112 sebagai berikut;

**Tabel. 112**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN RATA-RATA SASARAN KINERJA %	REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (Rp)	TINGKAT EFISIENSI
	MISI 1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata					
	TUJUAN 1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,19		
		Tingkat Pencapaian sasaran I			100,40	94,80	5,6

	MISI 2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
	TUJUAN 2	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat					
2	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12,44		
		2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	9,13		
		Tingkat Pencapaian sasaran 2			99,52	88,46	11,06
	TUJUAN 3	Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender					
3	Meningkatnya partisipasi perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,67		
		Tingkat Pencapaian sasaran 3			98,34%	94,87	3,47
	TUJUAN 4	Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja					
4	Meningkatnya peluang lapangan kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,38		
		Tingkat Pencapaian sasaran 4			52,88	95,67	-42,79
5	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	1	Indeks Inovasi daerah	Indeks	39,99 poin (Inovativ)		
		Tingkat Pencapaian sasaran 5			66,65	99,94	-33,29
	Misi 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah					
	Tujuan 5	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing					
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	1	PDRB Perkapita	%	23,04%		
		Tingkat Pencapaian sasaran 6			220,47%	96,30	124,17
7	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	1	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	%	17.716.666.908.464		
		Tingkat Pencapaian sasaran 7			148,25%	98,00	50,25
	Tujuan 6	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas					

8	Meningkatnya kemandirian desa	1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7538 (Desa Maju)		
		Tingkat Pencapaian sasaran 8			106,58	97,15	9,43
	Tujuan 7	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan					
9	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,99%		
		Tingkat Pencapaian sasaran 9			98,41	97,00	1,41
	Tujuan 8	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis					
10	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	0		
		Tingkat Pencapaian sasaran 10			0	99,99	99,99
	Misi 4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah					
	Tujuan 9	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah					
11	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	1,262		
		Tingkat Pencapaian sasaran 11			241,76	92,00	149,76
12	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	Rasio Konektivitas Kabupaten		0,61		
		Tingkat Pencapaian sasaran 12			67,77	93,16	-25,39
	Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
	Tujuan 10	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik					
13	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1	Predikat SAKIP	Kategori	60,13/B		
		2	Indeks RB	Indeks	69,21/B		
		3	Nilai LPPD	Poin	N/A		
		4	Opini BPK	Kategori	WTP*		
		Tingkat Pencapaian sasaran 13			87,22	16,94	70,28

### 3.1.4 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Adapun jumlah program yang menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 113**  
**Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran Perubahan 2024**

<b>A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>I. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	216.788.764.298,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	71.821.977.548,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	516.778.490,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.929.454.480,00
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	549.086.100,00
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	601.613.600,00
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	314.130.000,00
<b>II. Dinas Kesehatan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.718.828.107,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.217.793.714,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.976.000,00
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	336.542.400,00
<b>III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.827.594.056,00
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13.492.947.015

3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.472.110.731,10
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	550.288.400,00
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.362.939.641,00
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	33.435.271.941,24
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	98.073.697.577,20
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	168.364.960,00
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.384.582.020,00
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.718.828.660,00
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25.470.284.519,31
<b>IV. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.987.526.937,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	574.037.600,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	663.669.250,00
<b>V. Dinas Sosial Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	4.478.216.338,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	527.234.648,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	635.223.800,00
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.305.022.000,00
5.	Program Penanganan Bencana	502.810.830,00
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.730.000,00
<b>B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>I. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.722.717.472,00
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	346.053.100

3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.915.024.400
4.	Program Hubungan Industrial	458.522.400
<b>II. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.907.084.941,00
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.993.875.600,00
3.	Program Pengendalian Penduduk	49.999.850,00
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	454.999.490,00
5.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	400.000.000,00
6.	Program Perlindungan Perempuan)	249.020.000,00
7.	Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	386.773.000,00
<b>III. Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.479.398.527,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	530.555.100,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	62.585.500,00
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.910.000,00
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	29.498.800,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	35.711.900,00
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	41.555.000,00
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.408.400,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	423.289.100,00
<b>IV. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.509.909.796,00

2.	Program Pendaftaran Penduduk	554.730.000,00
3.	Program Pencatatan Sipil	101.216.000,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	198.756.000,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.180.000,00
<b>V. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.951.362.639,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.337.114.320,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.042.593.070,00
<b>VI. Dinas Perhubungan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.471.259.153,00
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,012,064,000,00
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	4.700.971.757,00
<b>VII. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.036.038.344,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	713.745.000,00
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	3.173.556.100,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.145.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	48.726.000,00
<b>VIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.383.134.347,00
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	21.294.900,00
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	20.959.700,00

4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	23.758.300,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	12.535.300,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	185.055.200,00
7.	Program Pengembangan UMKM	41.534.000,00
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	20.123.300,00
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.396.169.529,00
10.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.142.459.800,00
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	56.644.150,00
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	149.501.450,00
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	335.498.600,00
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.999.800,00
15.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	20.450.650,00
<b>IX. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.842.311.903,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	321.583.450,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	432.233.400,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	261.598.900,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394.729.000,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	140.915.900,00
<b>X. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.081.092.353,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	13.669.586.053,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	183.527.200,00
<b>C. Urusan Pemerintah Pilihan</b>		
<b>I. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah</b>		

<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.905.395.976,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	888.067.042,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	493.694.350,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.258.470.960,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.539.472.850,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00
<b>II. Dinas Perikanan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.746.723.270,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.979.551.700,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.688.203.100,00
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	827.746.200,00
<b>III. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.739.399.289,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	417.968.400,00
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	21.638.850,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.390.574.663,00
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.428.661.355,00
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	260.159.265,00
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	3.291.948.800,00
8.	Program Penyuluhan Pertanian	736.218.330,00
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	39.814.400,00
<b>D. Urusan Penunjang</b>		
<b>I. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.906.821.307,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.051.813.510,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	325.237.280,00
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	473.524.290,00
<b>II. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.391.441.368,96
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	246.317.295.728,00
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	5.348.043.000,00
<b>III. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,069,049,820.00
2.	Program Kepegawaian Daerah	2,238,979,300.00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,550,810,800.00
<b>IV. Badan Pendapatan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.534.466.052,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.753.683.892,00
<b>V. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.525.657.133,50
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.557.573.509,99
<b>VI. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.234.329.899,00
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	44.067.766.663,00
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.251.571.500,00
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	616.976.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	229.800.000,00

6.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1.357.340.000,00
<b>E. Sekretariat Daerah</b>		
<b>I. Bagian Administrasi Pemerintahan</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.838.350,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.366.953.750,00
<b>II. Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.803.300,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	42.851.942.780,00
<b>III. Bagian Hukum Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.183.800,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	429.816.200,00
<b>IV. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam</b>		<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	967.047.000,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	384.750.450,00
<b>V. Bagian Administrasi Pembangunan</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.741.350,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	592.258.600,00
<b>VI. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.991.755.000,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.312.700.000,00

<b>VII. Bagian Umum</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00
<b>VIII. Bagian Organisasi Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00
<b>IX. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.192.869.800,00
<b>F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	28.372.957.311,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	15.878.701.350,00
<b>G. Inspektorat Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	5.271.516.550,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.200
<b>H. RSUD Kolonodale</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00
<b>I. Kecamatan</b>		
<b>J. Kecamatan Petasia</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.997.786.886,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	-
<b>II. Kecamatan Lembo</b>		

<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.219.904.082,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	445.103.000,00
<b>III. Kecamatan Mori Atas</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.410.009,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00
<b>IV. Kecamatan Bungku Utara</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	564.847.710,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00
<b>V. Kecamatan Soyo Jaya</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	265.148.805,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	83.364.000,00
<b>VI. Kecamatan Mamosalato</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	344.316.250,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00
<b>VII. Kecamatan Lembo Raya</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	364.010.000,00
<b>VIII. Kecamatan Mori Utara</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.796.950,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	37.000.000,00

<b>IX. Kecamatan Petasia Timur</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	902.644.955,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	91.955.000,00
<b>X. Kecamatan Petasia Barat</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.737.069.490,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.200.000,00

### **3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, di mana arah dan kebijakan umum diupayakan pada program-program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan penganggaran daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penganggaran tersebut mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang transparansi, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efisiensi serta efektif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah ini disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2024 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program dan kegiatan. Akuntabilitas keuangan

mempresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2024 Pagu Anggaran Program sebesar **Rp. 1.278.329.399.354,30** sedangkan untuk realisasinya sebesar **Rp. 964.003.748.938,88**. Anggaran ini sudah terbagi dalam 18 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 10 Kecamatan dan 9 Bagian, 1 Sekretariat DPRD serta 1 UPT. RSUD yang sudah terjabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam DPA Perubahan tahun 2024, dengan realisasi pada tabel berikut :

**Tabel. 114**  
**Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>292,521,804,516</b>	<b>258,825,867,885</b>	<b>88,48%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	216.788.764.298,00	185.719.476.625,00	85,66%
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	71.821.977.548,00	69.555.108.624,00	96,84%
3.	Program Pengembangan Kurikulum	516.778.490,00	513.099.090,00	99,28%
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	94,07%
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	549.086.100,00	517.946.550,00	94,32%
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	601.613.600,00	395.984.600,00	65,82%
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	314.130.000,00	309.194.063,00	98,43%
2.	Dinas Kesehatan Daerah			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>184.794.300.722,00</b>	<b>179.204.720.217,00</b>	<b>96,97%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.718.828.107,00	114.810.871.143,00	98,36%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.217.793.714,00	63.770.795.406,00	94,87%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.976.000,00	24.963.000,00	99,94%

4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	336.542.400,00	247.192.900,00	73,45%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	676.160.100,00	668.706.168,00	98,89%
<b>3.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah</b>			
<b>NO</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>206.956.909.520,85</b>	<b>184.330.796.624,00</b>	<b>89,06%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.827.594.056,00	11.498.691.077,00	97,22%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13.492.947.015	12.893.764.137,00	95,55%
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.472.110.731,10	12.574.466.519,00	81,27%
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	550.288.400,00	543.419.943,00	98,75%
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.362.939.641,00	4.353.575.526,00	99,79%
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	33.435.271.941,24	26.579.408.901,00	79,50%
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	98.073.697.577,20	88.717.714.747,00	90,46%
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	168.364.960,00	51.717.700,00	30,72%
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.384.582.020,00	1.334.551.620,00	96,39%
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.718.828.660,00	507.421.246,00	18,66%
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25.470.284.519,31	25.276.065.208,00	99,24%
<b>4.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>663.669.250,00</b>	<b>663.579.050,00</b>	<b>99,99%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.987.526.937,00	14.698.634.310,00	98,07%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	574.037.600,00	573.287.974,00	99,87%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	663.669.250,00	663.579.050,00	99,99%
<b>5.</b>	<b>Dinas Sosial Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>

	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>7.486.237.616,00</b>	<b>6.789.756.722,00</b>	<b>90,70%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	4.478.216.338,00	4.247.759.056	98,56%
2.	Program Pemberdayaan Sosial	527.234.648,00	499.404.319,00	99,36%
3.	Program Rehabilitasi Sosial	635.223.800,00	596.923.800,00	95,80%
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.305.022.000,00	908.739.725,00	90,30%
5.	Program Penanganan Bencana	502.810.830,00	499.199.822,00	99,85%
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.730.000,00	37.730.000,00	100%
<b>B.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>			
<b>1.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>10.781.545.372,00</b>	<b>10.314.846.777,00</b>	<b>95.67%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.722.717.472,00	4.536.716.482,00	93,43%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	346.053.100	279.609.304	80.80
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.915.024.400	4.737.251.852	96.38
4.	Program Hubungan Industrial	458.522.400	423.115.160	92.28
<b>2.</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>15.441.752.881,00</b>	<b>14.651.101.432,00</b>	<b>94,87%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.907.084.941,00	6.544.793.207,00	94,35%
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.993.875.600,00	6.598.787.100,00	94,90%
3.	Program Pengendalian Penduduk	49.999.850,00	47.453.350,00	99,23%
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	454.999.490,00	451.524.600,00	99,23%
5.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
6.	Program Perlindungan Perempuan)	249.020.000,00	246.929.500,00	88,29%

7.	Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	386.773.000,00	361.613.675,00	93,50%
<b>3.</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>9.645.912.327,00</b>	<b>9.356.459.904,00</b>	<b>97,00%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.479.398.527,00	8.235.764.065,00	97,12%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	530.555.100,00	505.932.377,00	95,35%
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	62.585.500,00	60.545.523,00	96,74%
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.910.000,00	7.860.000,00	99,37%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	29.498.800,00	28.920.000,00	72,35%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	35.711.900,00	35.416.000,00	99,17%
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	41.555.000,00	40.278.100,00	96,93%
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.408.400,00	20.020.400,00	56,54%
9.	Program Pengelolaan Persampahan	423.289.100,00	421.723.439,00	99,95%
<b>4.</b>	<b>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>8.378.791.796,00</b>	<b>6.331.048.061,00</b>	<b>75,36%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.509.909.796,00	5.515.111.967,00	73,44%
2.	Program Pendaftaran Penduduk	554.730.000,00	548.049.472,00	98,80%
3.	Program Pencatatan Sipil	101.216.000,00	100.995.622,00	90,78%
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	198.756.000,00	152.961.000,00	76,96%
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.180.000,00	13.930.000,00	98,24%
<b>5.</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah</b>			

No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>11.331.070.029,00</b>	<b>11.007.683.455,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.951.362.639,00	4.788.088.542,00	96,70%
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.337.114.320,00	2.293.618.941,00	98,14%
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.042.593.070,00	3.925.975.972,00	97,11%
<b>6.</b>	<b>Dinas Perhubungan Daerah</b>			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>17,184,294,910,00</b>	<b>16.393.892.260,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.471.259.153,00	6.285.003.280,00	97.12%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,012,064,000,00	5.984.795.775,00	99.54%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	4.700.971.757,00	4.124.093.205,00	87,72%
<b>7.</b>	<b>Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>9.147.210.444,00</b>	<b>8.401.971.403,00</b>
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.036.038.344,00	4.607.792.041.00	91,50%
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	713.745.000,00	641.935.531.00	89.94%
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	3.173.556.100,00	2.978.408.923.00	93,85%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.145.000,00	128.451.992.00	73,34%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	48.726.000,00	45.382.916,00	93,14%
<b>8.</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah</b>			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>9.859.119.026,00</b>	<b>9.494.597.448,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.383.134.347,00	4.121.922.828,00	94,04%
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	21.294.900,00	20.987.100,00	98,55%

3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	20.959.700,00	20.850.700,00	99,48%
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	23.758.300,00	21.411.100,00	90,12%
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	12.535.300,00	12.392.500,00	98,86%
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	185.055.200,00	168.407.860,00	91,00%
7.	Program Pengembangan Umkm	41.534.000,00	12.990.000,00	31,28%
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	20.123.300,00	19.246.900,00	95,64%
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.396.169.529,00	1.392.520.550,00	99,74%
10.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.142.459.800,00	3.116.190.194,00	99,16%
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	56.644.150,00	56.347.716,00	99,48%
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	149.501.450,00	145.971.650,00	97,64%
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	335.498.600,00	316.743.300,00	94,41%
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.999.800,00	48.541.800,00	97,08%
15.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	20.450.650,00	20.073.250,00	98,15%
<b>9.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>18.393.372.553,00</b>	<b>17.973.849.493,00</b>	<b>98,00%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.842.311.903,00	16.518.227.143,18	98,08%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	321.583.450,00	321.061.650,00	99,84%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	432.233.400,00	428.748.400,00	99,19%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	261.598.900,00	180.059.300,00	68,83%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394.729.000,00	390.953.000,00	99,04%

6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	140.915.900,00	134.800.000,00	95,66%
<b>10.</b>	<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>14.934.205.606,00</b>	<b>12.007.976.117,00</b>	<b>80,40%</b>
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.081.092.353,00	1.003.981.974,00	92,87%
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	13.669.586.053,00	10.820.639.627,00	79,16%
3.	Program Pengelolaan Arsip	183.527.200,00	183.354.516,00	99,91%
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>			
<b>1.</b>	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>14.285.101.178,00</b>	<b>13.019.006.511,00</b>	<b>91,14%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.905.395.976,00	6.434.434.643,00	93,18%
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	888.067.042,00	885.757.400,00	99,73%
3.	Program Pemasaran Pariwisata	493.694.350,00	470.637.430,00	95,33%
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.258.470.960,00	986.856.550,00	78,42%
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.539.472.850,00	4.041.320.488,00	92,56%
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00	200.000.000,00	100%
<b>2.</b>	<b>Dinas Perikanan Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>14.242.224.270,00</b>	<b>13.810.662.774,00</b>	<b>96,97%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.746.723.270,00	5.360.022.751,00	93,27%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.979.551.700,00	4.945.329.600,00	99,31 %
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.688.203.100,00	2.677.872.923,00	99,62 %
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	827.746.200,00	827.437.500,00	99,96 %
<b>3.</b>	<b>Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>

	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>52.326.383.352,00</b>	<b>49.842.107.956,89</b>	<b>95,25%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.739.399.289,00	20.400.544.018,00	98,37%
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	417.968.400,00	384.291.900,00	91,94%
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	21.638.850,00	15.156.600,00	70,04%
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.390.574.663,00	18.122.578.406,00	98,54%
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.428.661.355,00	.232.678.547,89	97,67%
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	260.159.265,00	257.922.815,00	99,14%
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	3.291.948.800,00	1.663.602.685,00	50,54%
8.	Program Penyuluhan Pertanian	736.218.330,00	729.448.985,00	99,08%
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	39.814.400,00	35.884.000,00	90,13%
<b>D</b>	<b>Urusan Penunjang</b>			
<b>1.</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>9.757.396.387,00</b>	<b>9.391.403.885,00</b>	<b>96,24%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.906.821.307,00	6.637.724.353,00	96,10%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.051.813.510,00	1.987.010.509,00	96,84%
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	325.237.280,00	293.420.633,00	90,21%
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	473.524.290,00	473.248.390,00	99,94%
<b>2.</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>299.056.780.096,96</b>	<b>32.024.251.730,00</b>	<b>10,70%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.391.441.368,96	32.024.251.730,00	67,57 %
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	246.317.295.728,00	131.072.492.999 ,00	53,21%
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	5.348.043.000,00	3.980.517.780 ,00	74,43%

<b>3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>5.858.839.920,00</b>	<b>5.609.199.338,00</b>	<b>95,74%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,069,049,820.00	1,040,314,185,00	103,08%
2.	Program Kepegawaian Daerah	2,238,979,300.00	2.077.353.845,00	68,36%
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,550,810,800.00	2.491.531.308,00	100%
<b>4. Badan Pendapatan Daerah</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>12.288.149.944,00</b>	<b>11.556.987.476,00</b>	<b>94,05%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.534.466.052,00	9.818.135.564,00	93,20%
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.753.683.892,00	1.738.851.912,00	99,15%
<b>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>22.083.230.643,49</b>	<b>20.517.097.688,00</b>	<b>92,90%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.525.657.133,50	7.216.761.483.00	96,00%
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.557.573.509,99	13.300.336.205,00	91,00%
<b>6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>51.757.784.062,00</b>	<b>50.905.687.468,99</b>	<b>98,35%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.234.329.899,00	4.021.372.092,00	94.97%
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	44.067.766.663,00	43.866.920.876,99	99,54%
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.251.571.500,00	1.248.684.500,00	99,76%
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	616.976.000,00	582.270.000,00	94.37%

5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	229.800.000,00	79.100.000,00	34,42 %
6.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.357.340.000,00	1.107.340.000,00	81,58%
<b>D</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
<b>1.</b>	<b>Bagian Administrasi Pemerintahan</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>8.468.792.100,00</b>	<b>3.620.054.460,00</b>	<b>42,74%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.838.350,00	813.867.612,00	73,86%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.366.953.750,00	2.806.186.848,00	38,74%
<b>2.</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>43.756.746.080</b>	<b>39.076.902.771</b>	<b>89,30%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.803.300,00	759.906.750,00	83,98%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	42.851.942.780,00	38.316.996.021,00	89,41%
<b>3.</b>	<b>Bagian Hukum Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>1.378.000.000,00</b>	<b>1.219.044.244,00</b>	<b>88,46%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.183.800,00	798.090.425,00	93,33%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	429.816.200,00	420.953.819,00	97,13%
<b>4.</b>	<b>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>1.351.797.450,00</b>	<b>1.155.717.348,00</b>	<b>85,49%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	967.047.000,00	906.739.898,00	93,76%
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	384.750.450,00	248.977.450,00	56,86%
<b>5.</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>1.079.999.950,00</b>	<b>1.030.288.328,00</b>	<b>95,39%</b>

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.741.350,00	441.024.428,00	90,42%
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	592.258.600,00	589.263.90,00	99,49%
<b>6.</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>4.304.455.000,00</b>	<b>4.269.639.134,00</b>	<b>99,00%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.991.755.000,00	3.003.041.511,00	99,00%
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.312.700.000,00	1.266.597.623,00	99,00%
<b>7.</b>	<b>Bagian Umum</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>21.560.280.933,00</b>	<b>19.996.993.030,00</b>	<b>92,74</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00	19.996.993.030,00	89,86%
<b>8.</b>	<b>Bagian Organisasi Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>1.112.309.004,00</b>	<b>925.253.114,00</b>	<b>83,18</b>
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00	925.253.114,00	89,41%
<b>9.</b>	<b>Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>2.192.869.800,00</b>	<b>2.035.668.149,00</b>	<b>92,83%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.192.869.800,00	2.035.668.149,00	92,83%
<b>E</b>	<b>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>44.251.658.661,00</b>	<b>41.505.992.211,00</b>	<b>93,79%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	28.372.957.311,00	27.352.422.474,00	96,40%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	15.878.701.350,00	14.153.569.737,00	89,13%
<b>F</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>			

No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>16.409.972.099,00</b>	<b>14.101.042.976,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	5.271.516.550,00	4.155.770.193.00	83.68%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.200	3.515.470.673.00	78.83%
<b>G</b>	<b>RSUD Kolonodale</b>			
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>123.736.552.179,00</b>	<b>122.269.758.573,00</b>	<b>98,81%</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.439.394.562,00	76.733.748.938,00	99,09%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.297.157.617,,00	45.536.009.635,00	98,36%
<b>H</b>	<b>Kecamatan</b>			
<b>1.</b>	<b>Kecamatan Petasia</b>			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>8.997.786.886,00</b>	<b>8.830.469.649,00</b>	<b>98,14%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.997.786.886,00	8.830.469.649,00	98,14%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Lembo</b>			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>3.665.007.082,00</b>	<b>3.493.148.248,00</b>	<b>95,31%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.219.904.082,00	3.048.364.348,00	94,67%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	445.103.000,00	444.783.900,00	99,90%
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Mori Atas</b>			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>3.551.285.625,00</b>	<b>3.551.285.625,00</b>	<b>100%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.362.785.625,00	3.362.785.625,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	188.500.000,00	188.500.000,00	100%
<b>4.</b>	<b>Kecamatan Bungku Utara</b>			

No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>4.971.425.078,00</b>	<b>4.788.892.752,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.921.375.078,00	4.738.852.752,00	96,29%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	50.050.000,00	50.040.000,00	99,98%
<b>5. Kecamatan Soyo Jaya</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>2.446.706.899,00</b>	<b>2.445.566.455,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.345.794.899,00	2.344.660.455,00	99,95%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100.912.000,00	100.906.000,00	99,99%
<b>6. Kecamatan Mamosalato</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>617.996.554,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	464.044.000,00	462.046.554,00	99,56%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	155.956.000,00	155.950.000,00	99,99%
<b>7. Kecamatan Lembo Raya</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>2.669.233.771,00</b>	<b>2.573.230.150,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.662.693.771,00	2.566.690.150,00	96,39%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.540.000,00	6.540.000,00	100%
<b>8. Kecamatan Mori Utara</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>428.796.950,00</b>	<b>428.796.950,00</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.796.950,00	391.796.950,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	37.000.000,00	37.000.000,00	100%
<b>9. Kecamatan Petasia Timur</b>				
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
		<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>994.599.955,00</b>	<b>991.481.735,00</b>

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	902.644.955,00	899.526.735,00	99,0%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	91.955.000,00	91.955.000,00	100%
<b>10.</b>	<b>Kecamatan Petasia Barat</b>			
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggran (Rp)</b>	<b>Capaian</b>
	<b>Total anggaran Program Pendanaan</b>	<b>2.766.269.490,00</b>	<b>2.736.107.352,00</b>	<b>98,90%</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.737.069.490,00	2.714.347.352,00	74,35%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.200.000,00	21.760.000,00	84,45%

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 1.665.857.452.335,00** dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah:

Pendapatan sebelum realisasi sebesar Rp. **1.665.857.452.335,00** setelah realisasi sebesar Rp. **1.595.436.806.095,99** (berkurang Rp. 70.420.646.239,01)

### 2. Belanja Daerah :

Belanja sebelum realisasi sebesar Rp. **1.665.492.192.835,00** setelah realisasi sebesar Rp. **1.529.400.118.378,66** (bertambah Rp.136.092.074.456,34)

### 3. Pembiayaan :

#### a. Penerimaan

Penerimaan sebelum realisasi sebesar Rp. **52.332.702.392,00** setelah realisasi sebesar Rp. **52.332.702.992,53**

#### b. Pengeluaran

Pengeluaran sebelum realisasi sebesar Rp. **52.697.961.892,00** setelah realisasi sebesar Rp. **50.974.849.892,00**

### 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, maka

dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 115**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (Konsolidasi) Tahun**  
**Anggaran 2024**  
**01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>Pendapatan Daerah:</b>	<b>1.665.857.452.335,00</b>	<b>1.595.436.806.095,99</b>	<b>95,77</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>228.610.133.180,00</b>	<b>168.150.788.363,99</b>	<b>73,55</b>
a.	Pendapatan Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.525.016.303,00	62,69
b.	Pendapatan retribusi Daerah	39.125.000.000,00	21.923.524.269,00	56,03
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	64.748.577.180,00	66.473.099.625,99	102,66
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.428.165.238.843,00</b>	<b>1.419.008.921.970,00</b>	<b>99,36</b>
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1.384.059.614.000,00	1.369.165.588.304,00	98,92
b.	Dana Perimbangan	1.267.799.946.000,00	1.247.055.795.304,00	98,36
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	116.259.668.000,00	122.109.793.000,00	105,03
c.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01
<b>2.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>9.082.080.312,00</b>	<b>8.277.095.762,00</b>	<b>91,14</b>
	<b>Jumlah pendapatan daerah</b>	<b>1.665.857.452.335,00</b>	<b>1.595.436.806.095,99</b>	<b>95,77</b>

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2024

### 3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan, baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 116**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.665.492.192.835,00</b>	<b>1.529.400.118.378,00</b>	<b>91,83</b>
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.095.412.945.221,18</b>	<b>998.019.459.287,48</b>	<b>91,11</b>
a.	Belanja Pegawai	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93
b.	Belanja Barang Dan Jasa	451.830.016.908,82	404.985.542.686,49	89,63
c.	Belanja Bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53
d.	Belanja Hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83
e.	Belanja Bantuan Sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>338.866.386.661,82</b>	<b>303.771.181.229,18</b>	<b>89,64</b>
a.	Belanja Modal Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	82.070.107.453,00	72.142.012.231,00	87,90
c.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26
d.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85
<b>2.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>1.157.886.000,00</b>	<b>36,76</b>
a.	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76
<b>3.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>228.062.860.952,00</b>	<b>226.451.591.862,00</b>	<b>99,29</b>
a.	Belanja Bagi Hasil	944.103.854,00	0,00	0,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>365.259.500,00</b>	<b>66.036.687.717,33</b>	<b>18.079,39</b>
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.665.492.192.835,00</b>	<b>1.529.400.118.378,66</b>	<b>91,83</b>

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2024

### 3.2.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan;

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanann baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 117**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>52.332.702.392,00</b>	<b>52.332.702.992,53</b>	<b>100,00</b>
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	52.332.702.392,00	52.332.702.992,53	100,00
<b>2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>52.697.961.892,00</b>	<b>50.974.849.892,00</b>	<b>96,73</b>
a.	Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38
b.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(365.259.500,00)</b>	<b>1.357.853.100,53</b>	<b>(371,75)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>0,00</b>	<b>67.394.540.817,86</b>	<b>0,00</b>

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2024

## **BAB IV P E N U T U P**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 adalah sangat baik, karena dari 10 tujuan dan 12 Indikator Tujuan, dengan 13 sasaran yang terdiri dari 17 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 27 di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 8 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target;

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Provinsi sebagian menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2024 belum dirilis.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, serta*** kordinasi antara seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya pemerintahan yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah khususnya Perangkat Daerah klaster utama maupun klaster pendukung dan tambahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama juga telah dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pusat secara lebih intensif.

#### **4.1.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memacu ketercapaian kinerja kegiatan utama adalah dengan cara menentukan langkah-langkah strategi serta terus melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan berbagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dan sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah provinsi Sulawesi tengah, upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Kolonodale, 14 Maret 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

# LAMPIRAN

## **PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Pada tahun 2024 Kabupaten Morowali Utara memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. 2 Oktober 2024 : Penghargaan Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Predikat SAKIP (B). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian PAN-RB.
2. 16 Desember 2024 : Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Predikat (A) diraih oleh Dinas
  - a. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
  - b. Dinas Sosial.
  - c. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - d. Dinas Pendidikan.
  - e. Puskesmas Molino
  - f. Puskesmas Kolonodale.

Penghargaan tersebut diserahkan di Palu dan diberikan langsung oleh Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah.

**FOTO PRESTASI DAN PENGHARGAAN PKPP**



**FOTO PRESTASI DAN PENGHARGAAN SAKIP**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN  
MOROWALI UTARA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

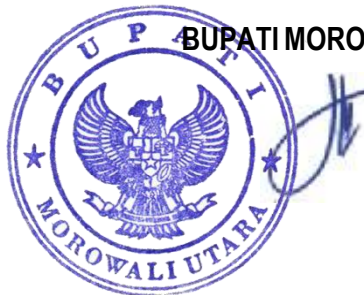
Jabatan : **BUPATI MOROWALI UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kolonodale, 18 Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

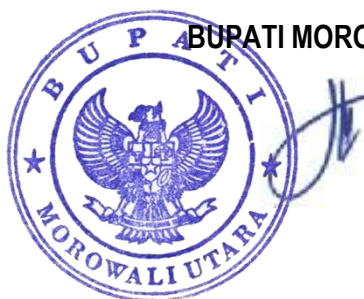


**Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	70,90
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60
		3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,10
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	4. Indeks Pemberdayaan Gender	98,30
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	6. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 Poin (Inovativ)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	7. PDRB Perkapita	10,45%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	8. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	11.950.000.000.000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	9. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81.28
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	11. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	12. Indeks Infrastruktur Daerah	0,522

12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	13. Rasio Konektivitas kabupaten	0,90
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	14. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		15. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		16. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		17. Opini BPK	WTP



**BUPATI MOROWALI UTARA,**

**Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

**PROGRAM PENDANAAN URUSAN KONKUREN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>A. rusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>I. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.847.675.965
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	65.622.473.701.
3.	Program Pengembangan Kurikulum	275.955.900
4.	Program Pengembangan Budaya	174.086.550
5.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	441.613.650
6.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	314.125.000
<b>II. Dinas Kesehatan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	159.848.047.571.00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	55.152.346.617.00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.976.400.00
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minuman	336.542.400.00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	39.969.300.00
<b>III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.799.107.856
2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	65.922.000
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.407.988.800
4.	Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	13.572.068.400

	Penyediaan Air Minum	
5.	Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	150.192.700
6.	Rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.210.813.641
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	36.079.999.412
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	66.392.205.326
9.	Rogram Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.266.478.000
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.028.978.710
<b>IV. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.289.722.637
2.	Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum	374.037.600
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	522.753.550
<b>V. Dinas Sosial Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.570.838.108,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	261.101.600,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	547.986.400,00
4.	Program Penanganan Bencana	329.817.830,00
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.325.601.800,00
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.730.000,00
<b>B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>I. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	5.150.200.272
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	116.373.400
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	346.053.100

4.	Program Hubungan Industrial	266.382.400
5.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.857.036.400
<b>II. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.029.548.641.00
2.	Program Pembinaan Keluarga berencana (KB)	6.913.894.430.00
3.	Program Pengendalian Penduduk	49.999.850.00
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	174.999.640.00
5.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	200.000.000.00
6.	Program Perlindungan Perempuan	119.020.000.00
7.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	37.250.500.00
8.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	12.750.000.00
9.	Program Perlindungan Khusus Anak	336.970.000.00
<b>III. Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.626.685.258.000
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	385.000.000.000
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	178.264.000.000
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Meracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.000.000.000
5.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60.000.000.000
6.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH)	30.000.000.000
7.	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	15.000.000.000
8.	Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI)	15.000.000.000

9.	Pengelolaan Persampahan	50.000.000.000
<b>IV. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.260.489.796
2.	Program Pendaftaran	666.700.000
3.	Program Pencatatan Sipil	101.216.000
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.180.000
<b>V. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.763.635.882
2.	Administrasi Pemerintah Desa	390.494.320
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.220.404.000
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	554.751.47
<b>VI. Dinas Perhubungan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.716.101.153
2.	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LlaJ)	4.387.187.000
3.	Program Pengelolaan Pelayanan	3.101.006.757,00
<b>VII. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	4.497.118.544
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	814.300.000
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	3.182.231.100
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.835.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	48.726.000

<b>VIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Urusan Pemerintah Dearah	4.241.523.997.00
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	21.294.900.00
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.959.700.00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	12.535.300.00
5.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	186.131.400.00
6.	Pengembangan UMKM	280.458.200.00
7.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20.123.300.00
8.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.015.031.950.00
9.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.157.749.900.00
10.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	56.644.150.00
11.	Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	20.450.650.00
12.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	149.501.450.00
13.	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	35.498.600.00
14.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.999.800.00
<b>IX. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.261.266.343
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.583.450
3.	Program Promosi Penanaman Modal	163.233.400
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	80.284.400
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394.729.000
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.252.400
<b>X. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.029.293.853
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	13.683.397.480
3.	Program Pengelolaan Kearsipan	179.348.400
<b>C. Urusan Pemerintah Pilihan</b>		
<b>I. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.187.101.672
2.	Program Pemasaran Pariwisata	288.020.450
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	823.897.583
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	64.471.110
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.707.436.350
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000
<b>II. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.688.054.339
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	118.360.350
3.	Program Pengawasan Ketahanan Pangan	21.638.850
4.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.517.619.513
5.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.202.815
6.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	41.894.400
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	3.242.747.900
8.	Program Penyuluhan Pertanian	204.522.030
<b>III. Dinas Perikanan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.471.033.920

2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.479.936.100
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.493.384.700
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	797.870.200
<b>D. Urusan Penunjang</b>		
<b>I. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.492.914.957
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.953.873.510
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	325.289.630
4.	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	275.858.290
<b>II. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45.868.170.459,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	244.192.029.441,00
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	654.950.500,00
<b>III. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.856.844.409.00
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.490.693.300.00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.315.561.300.00
<b>IV. Badan Pendapatan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.549.625.068
2.	Program Pengelolaan Pendapat Daerah	1.648.874.932
<b>V. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.592.139.588.
2.	Program Penanggulangan Bencana	3.312.804.150
<b>VI. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.523.875.915

2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	43.680.182.800
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	79.800.000
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	616.976.000
5.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.240.469.500
6.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	35.255.445
<b>E. Sekretariat Daerah</b>		
<b>I. Bagian Administrasi Pemerintahan</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.170.195.550
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.888.866.150
<b>II. Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	804.254.600
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	32.589.453.480
<b>III. Bagian Hukum Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	925.351.800
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	452.648.200
<b>IV. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam</b>		<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	727.487.000.00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	238.810.450.00
<b>V. Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.016.000.00

2.	Program Prekonomian dan Pembangunan	601.184.000.00
<b>VI. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.176.675.000
2.	Program Prekonomian dan Pembangunan	1.148.230.000
<b>VII. Bagian Umum Dan Perlengkapan</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.710.505.531.00
<b>VIII. Bagian Organisasi Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.338.000.000
<b>IX. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.915.999.950.00
<b>F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.618,269.350
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	12.950.858.050
<b>G. Inspektorat Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.638.741.299
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.361.230.800
<b>H. RSUD Kolonodale</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.650.069.245.00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36.854.479.056.00

<b>I. Kecamatan</b>		
<b>J. Kecamatan Petasia</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.764.563.449
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	430.684.408
<b>II. Kecamatan Lembo</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.613.189.082
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	333.318.000
<b>III. Kecamatan Mori Atas</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.476.451.625
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.434.000
<b>IV. Kecamatan Bungku Utara</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	259.469.588
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50.050.000
<b>V. Kecamatan Soyo Jaya</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.108.809.286
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	83.364.000
<b>VI. Kecamatan Mamosalato</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.235.524.688
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	131.918.000

<b>VII. Kecamatan Lembo Raya</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.655.453.771
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.540.000
<b>VIII. Kecamatan Mori Utara</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.985.565.161
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	37.000.000
<b>IX. Kecamatan Petasia Timur</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	649.499.902
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.500.000
<b>X. Kecamatan Petasia Barat</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.856.669.760
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.600.000

Kolonodale, 18 Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**  
Jabatan : **BUPATI MOROWALI UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kolonodale, 27 November 2024  
BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	18. Angka harapan hidup	71,90
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	19. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,60
		20. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,10
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	21. Indeks Pemberdayaan Gender	98,30
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,5 %
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	23. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 (Inovatif)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	24. PDRB Perkapita	10.45%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	25. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	11.950.000.000.000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	26. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,28
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	28. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	29. Indeks Infrastruktur Daerah	0,522
12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	30. Rasio Konektivitas kabupaten	0,90

13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	31. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		32. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		33. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		34. Opini BPK	WTP

Kolonodale, 27 November 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

**PROGRAM PENDANAAN URUSAN KONKUREN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2024**

<b>A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	216.788.764.298,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	71.821.977.548,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	516.778.490,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.929.454.480,00
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	549.086.100,00
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	601.613.600,00
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	314.130.000,00
<b>2. Dinas Kesehatan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.718.828.107,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.217.793.714,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.976.000,00
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	336.542.400,00
<b>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.827.594.056,00
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13.492.947.015
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.472.110.731,10

4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	550.288.400,00
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.362.939.641,00
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	33.435.271.941,24
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	98.073.697.577,20
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	168.364.960,00
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.384.582.020,00
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.718.828.660,00
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	25.470.284.519,31
<b>4. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.987.526.937,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	574.037.600,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	663.669.250,00
<b>5. Dinas Sosial Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	4.478.216.338,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	527.234.648,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	635.223.800,00
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.305.022.000,00
5.	Program Penanganan Bencana	502.810.830,00
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.730.000,00
<b>B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>1. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.722.717.472,00
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	346.053.100

3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.915.024.400
4.	Program Hubungan Industrial	458.522.400
<b>2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.907.084.941,00
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.993.875.600,00
3.	Program Pengendalian Penduduk	49.999.850,00
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	454.999.490,00
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	400.000.000,00
6	Program Perlindungan Perempuan)	249.020.000,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	386.773.000,00
<b>3. Dinas Lingkungan Hidup Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.479.398.527,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	530.555.100,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	62.585.500,00
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.910.000,00
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	29.498.800,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	35.711.900,00
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	41.555.000,00
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	35.408.400,00
9	Program Pengelolaan Persampahan	423.289.100,00
<b>4. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah</b>		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.509.909.796,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	554.730.000,00
3.	Program Pencatatan Sipil	101.216.000,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	198.756.000,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.180.000,00
<b>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.951.362.639,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.337.114.320,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.042.593.070,00
<b>6. Dinas Perhubungan Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.471.259.153,00
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,012,064,000,00
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	4.700.971.757,00
<b>7. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.036.038.344,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	713.745.000,00
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	3.173.556.100,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	175.145.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	48.726.000,00
<b>8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.383.134.347,00
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	21.294.900,00
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	20.959.700,00
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	23.758.300,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	12.535.300,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	185.055.200,00
7.	Program Pengembangan UMKM	41.534.000,00
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	20.123.300,00
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.396.169.529,00
10.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.142.459.800,00
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	56.644.150,00
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	149.501.450,00
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	335.498.600,00
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	49.999.800,00
15.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	20.450.650,00
<b>9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.842.311.903,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	321.583.450,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	432.233.400,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	261.598.900,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394.729.000,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	140.915.900,00
<b>10. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.081.092.353,00

2.	Program Pembinaan Perpustakaan	13.669.586.053,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	183.527.200,00
<b>3. Urusan Pemerintah Pilihan</b>		
<b>1. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.905.395.976,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	888.067.042,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	493.694.350,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.258.470.960,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.539.472.850,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00
<b>2. Dinas Perikanan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.746.723.270,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.979.551.700,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.688.203.100,00
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	827.746.200,00
<b>3. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.739.399.289,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	417.968.400,00
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	21.638.850,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	18.390.574.663,00
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.428.661.355,00
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	260.159.265,00

7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	3.291.948.800,00
8.	Program Penyuluhan Pertanian	736.218.330,00
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	39.814.400,00
<b>4. Urusan Penunjang</b>		
<b>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.906.821.307,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.051.813.510,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	325.237.280,00
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	473.524.290,00
<b>2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.391.441.368,96
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	246.317.295.728,00
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	5.348.043.000,00
<b>3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,069,049,820.00
2.	Program Kepegawaian Daerah	2,238,979,300.00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,550,810,800.00
<b>4. Badan Pendapatan Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.534.466.052,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.753.683.892,00
<b>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.525.657.133,50
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.557.573.509,99
<b>6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>		

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.234.329.899,00
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	44.067.766.663,00
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.251.571.500,00
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	616.976.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	229.800.000,00
6.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.357.340.000,00
<b>5. Sekretariat Daerah</b>		
<b>1. Bagian Administrasi Pemerintahan</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.838.350,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.366.953.750,00
<b>2. Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.803.300,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	42.851.942.780,00
<b>3. Bagian Hukum Daerah</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.183.800,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	429.816.200,00
<b>4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam</b>		<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	967.047.000,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	384.750.450,00
<b>5. Bagian Administrasi Pembangunan</b>		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.741.350,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	592.258.600,00
<b>6. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa</b>		
No	Program Pe ndanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.991.755.000,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.312.700.000,00
<b>7. Bagian Umum</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00
<b>8. Bagian Organisasi Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00
<b>9. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.192.869.800,00
<b>10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	28.372.957.311,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	15.878.701.350,00
<b>6. Inspektorat Daerah</b>		
No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	5.271.516.550,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.200
<b>7. RSUD Kolonodale</b>		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.763.629.119,00

	Kabupaten/Kota	
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00
<b>8. Kecamatan</b>		
<b>1. Kecamatan Petasia</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.997.786.886,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	-
<b>2. Kecamatan Lembo</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.219.904.082,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	445.103.000,00
<b>3. Kecamatan Mori Atas</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.410.009,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00
<b>4. Kecamatan Bungku Utara</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	564.847.710,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00
<b>5. Kecamatan Soyo Jaya</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	265.148.805,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	83.364.000,00
<b>6. Kecamatan Mamosalato</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	344.316.250,00

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00
<b>7. Kecamatan Lembo Raya</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	364.010.000,00
<b>8. Kecamatan Mori Utara</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.796.950,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	37.000.000,00
<b>9. Kecamatan Petasia Timur</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	902.644.955,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	91.955.000,00
<b>10. Kecamatan Petasia Barat</b>		
<b>No</b>	<b>Program Pendanaan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.737.069.490,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.200.000,00

Kolonodale, 27 November 2024  
 BUPATI MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS